

SKRIPSI

**ANALISIS KEMITRAAN DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DI DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA**



Oleh:

CITRA RAMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115718

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**ANALISIS KEMITRAAN DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DI DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG
KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

CITRA RAMADHANI

Nomor Induk Mahasiswa: 105611115718

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

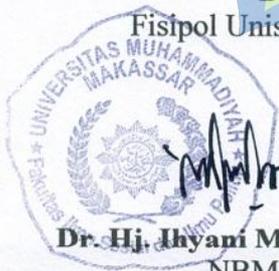
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Citra Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11157 18

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara




Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 054/FSP/A.4-II/VII/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

3. Dr. Abdi, M.Pd

4. Dr. Hafiz Elfianya Parawu, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Citra Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115718

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Februari 2022

Yang Menyatakan,


Citra Ramadhani

ABSTRAK

Citra Ramadhani, 2022. Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Muhlis Madani dan Abdi)

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemitraan kelembagaan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memahami kemampuan yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumen dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan. Kemudian Teknik pengeabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, truangulasi Teknik dan triangulasi teori.

Hasil penelitian menunjukkan Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringgala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif berdasarkan indikator keberhasilan kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti yaitu, Indikator Input, Indikator Proses, Indikator Output, dan Indikator Outcome. Pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS sudah berjalan baik dilihat dari indikator keberhasilan kemitraan yang ada, selain itu pembangunan sejak awal pengelolaan kemitraan juga terjadi peningkatan. Melalui pengelolaan kemitraan ini juga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Segi yang belum optimal yaitu masalah anggaran alokasi dana desa yang masih minim sehingga pembanguna Desa Wisata belum Merata.

Kata Kunci: Analisis, Kemitraan, Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

ABSTRACT

Citra Ramadhani, 2022. Analysis of Partnerships in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in Biringala Village, Barombong District, Gowa Regency. (Supervised by Muhlis Madani, and Abdi)

The purpose of this study was to determine institutional partnerships in realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Biringala Village, Barombong District, Gowa Regency. The research method used is qualitative to understand the abilities that are capable of being carried out by research subjects, while the power collection technique uses observation, interviews and document studies with a total of 9 informants. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. Then the data validation technique used is source triangulation, technique triangulation and theoretical triangulation.

The results show that the Partnership Analysis in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in Biringgala Village, Barombong District, Gowa Regency has been running well but not yet effective based on the indicators of partnership success according to the Directorate General of P2L & PM in Kuswidanti, namely, Input Indicators, Process Indicators, Output Indicators, and Outcome Indicator. The management of partnerships through BUMDes and POKDARWIS has been going well, seen from the indicators of the success of existing partnerships, besides that, since the beginning of partnership management, there has also been an increase. Through the management of this partnership can also generate local revenue. The aspect that is not optimal is the problem of the budget allocation of village funds which is still minimal so that the development of Tourism Villages is not evenly distributed.

Keywords: Analysis, Partnership, Realizing Sustainable Development Goals (SDGs).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Nurwahid, S.Sos., M.Si, selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Abdi, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi

6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dorongan dalam aktivitas studi penulis
9. Teristimewa untuk Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Mei 2022



Citra Ramadhani

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Teori dan Konsep	11
C. Kerangka Pikir	39
D. Fokus Penelitian.....	41
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Lokasi	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
C. Informan.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46

F. Teknik Pengabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan penelitian dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	53
Tabel 4.2 Luas Lahan Pengairan, Tadah Hujan & Pekarangan	54
Tabel 4.3 Sarana Perhubungan.....	54
Tabel 4.4 Sarana Pelayanan Umum.....	55
Tabel 4.5 Sarana Olah Raga, Pendidikan & Peribadatan.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	40
Gambar 4.1 Gambar wilayah kabupaten gowa	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan upaya terpadu dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. SDSs di sahkan pada tanggal 25 september 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan pembangunan Bersama yang berakhir pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh banyak Negara pada Konferensi Pesorikatan Bangsa – Bangsa (PBB) di New York, amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) Desa mempunyai 18 Program Pembangunan berkelanjutan. Dengan kehadiran SDGs dimaksudkan guna mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam proram SDGs pada poin ke tujuh belas (17) yaitu kemitraan untuk pembangunan Desa di Bidang Pariwisata.

Desa sebagai penyelenggara pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak baik dalam pelayanan maupun pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa beserta perangkat desa dan perlemen desa. Untuk menuju tata pemerintahan desa yang lebih berkemajuan maka dibutuhkan kemitraan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pihak ketiga, sebagaimana rujukan Undang-undang Desa tahun 2014 tentang

kerjasama dengan pihak ketiga pasal 93: (1) kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarakan dalam musyawarah desa.

Terminologi kerjasama (*partnership*) atau kemitraan, lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (*goods*) dalam memberikan suatu pelayanan jasa (*service delivery*) (Kariem, 2003).

Kerangka kebijakan dalam sebuah kemitraan adalah bagian dari prinsip ke-11 dari *good governance*, yaitu kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private and civil society partnership*). Menurut Bappenas dalam Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (Bappenas 2007), kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan riil (*demand driven*).

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih maju maka pemerintah harus saling berkesinambungan dengan masyarakat. Pemerintah seharusnya mengamanahkan sebagian dari kekuasaan kepada masyarakat, sehingga kedua belah pihak yang bermitra dapat mengambil andil yang tepat dalam pembangunan desa. Hal ini mengakibatkan perlu adanya kemitraan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Jika di lihat dari mamfaat kemitraan dimana akan saling memberikan manfaat kepada kedua pihak yang bermitra maka akan terlaksana

dengan baik tujuan yang sudah di sepakati dan bukan sebaliknya yang ada satu pihak yang di rugikan atau merugikan lawan mitra (Sulistiyani, 2017).

Bisnis merupakan sebuah proses yang didasari atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak; karyawan dari berbagai unit bisnis, manajemen, pemegang saham, para pemasok, konsultan, tenaga pemasar, distributor, agensi periklanan, dan lain sebagainya. Belum lagi adanya hubungan dengan pihak lain yang terdampak atau memberikan dampak bagi bisnis tersebut; misalnya masyarakat sekitar pabrik, pemerintah lokal, keluarga karyawan, para pesaing bisnis, dan lain sebagainya. Keseluruhan proses relasi, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak tersebut harus dikelola dengan baik agar tujuan bisnis tercapai. Itulah inti dari membangun kemitraan yang baik.

Baik pembangunan sosial, ekonomi atau infrastruktur, kita melihat terlalu banyak contoh program yang dilakukan oleh organisasi yang beroperasi secara terpisah satu sama lain. Kurangnya koordinasi berdasarkan komunikasi dan rasa tujuan bersama di antara pemangku kepentingan utama mengurangi efisiensi dan dampak program. Beroperasi tanpa semangat dan kerangka kemitraan juga menyebabkan rasa takut untuk berbagi ide dan kemampuan. Kemampuan untuk berbagi dan menggabungkan kemampuan di antara organisasi yang berbeda dapat menjadi sangat penting untuk keberhasilan dalam program yang berhubungan dengan ekonomi “pasar” atau tantangan dari pemerintahan yang terdesentralisasi. Kemitraan dapat menyediakan mekanisme yang kuat untuk pemecahan masalah, baik dengan memanfaatkan sumber daya fisik dan keuangan yang lebih besar maupun dengan meningkatkan sumber daya intelektual dan kreatif yang dapat

difokuskan pada suatu masalah. Kolaborasi antar mitra juga dapat meningkatkan kesadaran bersama yang lebih baik dan membangun jaringan kontak yang dinamis yang dapat mengubah konflik menjadi kerjasama. Selain itu, membangun kemitraan yang efektif sangat diuntungkan dari keterampilan dan teknik pragmatis. Dengan terlibat secara konstruktif dengan beragam pemain pembangunan, kita dapat belajar bagaimana melakukan kemitraan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang dibuat di masa lalu.

Secara teoritis, Eisler dan Montuori (2001:11) membuat pernyataan yang menarik yang berbunyi “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan”.

Istilah kemitraan seringkali dipertukarkan dengan banyak istilah lain seperti kolaborasi, aliansi, ko-produksi atau konsorsium. Istilah-istilah ini sebenarnya sebagai perwujudan dari kerjasama antar individu atau kelompok yang saling membantu, saling menguntungkan dan secara bersama-sama meringankan pencapaian tujuan yang telah mereka sepakati bersama. Permasalahan definisi ini kemudian diikuti dengan pernyataan mendasar bahwa kemitraan sebagai proses, produk, hasil penjelajahan, atau hasil akhir (Borrini Feyerabend, 1996).

Secara khusus pada bidang pelayanan publik, pengertian kemitraan mengacu kepada dukungan sukarela dan resiprokal (timbang balik) antara dua atau lebih badan sektor publik yang berbeda. Dengan kata lain antar administrasi publik dengan privat, termasuk organisasi nonprofit. Berbagai sektor tersebut

saling memberikan dukungan satu sama lain dalam rangka pelayanan publik yang menjadi bagian dari misi pemerintah.

Pengertian kemitraan sebagai kerja bersama (*working together*) dikemukakan oleh Hodget & Johson (2001:323) bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam kemitraan terjadi relasi antarorganisasi dan dengan relasi tersebut akan tercipta kerja sama. Sistem kemitraan bertumpu pada kepercayaan.

Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena, pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, perguruan tinggi, dunia usaha, supra desa, tentu juga aparatur desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD).

Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap desa perlu melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir khususnya dengan supra desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha.

Dalam rangka tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator agar program SDGs di Desa tersebut dapat berjalan dengan efektif di antaranya: keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga, ketersediaan

jaringan internet di Desa, statistik Desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh Desa.

Konsekuensi dari persepsi yang mendasari analisis pada (Kamis 18-02-2022) peneliti beranggapan bahwa Kemitraan Desa Biringgala dalam Mewujudkan SDGs belum berjalan dengan baik, karena kurangnya keterlibatan Pemerintah Desa Biringgala dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan dana desa, peningkatan taraf hidup dan keterampilan masyarakat serta pemanfaatan untuk pengembangan desa wisata (Ungkapan dari sekretaris Desa Biringgala).

Dana desa diharapkan dapat mendorong desa untuk dapat melakukan perubahan agar meraih kemajuan lebih baik. Walau pada kenyataannya, dana desa ini bukan tanpa permasalahan. Ada pula beberapa contoh kesuksesan pemanfaatan dana desa yang bisa kita amati, diantaranya seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang memberikan pengaruh terhadap efektivitas program desa sejahtera mandiri, peningkatan taraf hidup dan keterampilan masyarakat, serta pemanfaatan untuk pengembangan wisata desa/desa wisata. Dalam praktiknya, desa melakukan pengembangan kepariwisataan dalam ruang lingkup desa melalui pengelolaan 2 lembaga yang berbentuk (1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (2) Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

Saat ini upaya pengembangan pariwisata di Desa Biringgala masih dalam tahap pengembangan. Namun demikian, pengembangan pariwisata tentu haruslah membutuhkan tahapan perencanaan yang komprehensif. Dalam konteks desa, hal ini untuk mencegah potensi permasalahan di masa yang akan datang terkait dengan

ketidaksesuaian sumber daya, serta pertanggungjawaban alokasi dana desa sebagaimana yang juga telah terjadi pada desa- desa lainnya (Fauzanto, 2020).

Penelitian ini penting dilakukan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat inovatif sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Menariknya penelitian ini karena akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh kemitraan dari Desa Biringala sebagai rujukan pembangunan berkelanjutan/SDGs di Desa Biringala.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul, “**Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran landasan yang telah dikemukakan, maka rencana permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana kemitraan kelembagaan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui kemitraan kelembagaan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan, terutama bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang Analisis kemitraan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kemitraan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagian dari faktor dari hasil survei masa lalu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diketahui bahwa:

1. (Setianingsih, 2018) dengan judul penelitian “Kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam program pamsimas” dimana hasil pencarian data nya menemukan bahwa:
 - a. Kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran antar sudah baik namun kekurangan kontribusi daerah kota selama waktu yang dihabiskan ingin menjadi pengurus bukanlah masalah main-main dalam pergaulan karena akan menimbulkan sensasi. dari tidak peduli dengan orang lain.
 - b. Hasil kemitraan yang dirasakan masyarakat tergolong cukup baik. Ditegaskan oleh hasil review yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan tentang dampak organisasi tingkat menengah, yaitu 39 orang atau 39% dan diikuti dengan penilaian asosiasi yang tinggi, yaitu 24 orang atau 24%, sangat tinggi sebanyak 19 individu atau 19% dan Yaang menyatakan bahwa itu hasil dari asosiasi rendah 18 individu atau 18%.
 - c. Kritik terhadap adanya kemitraan yaitu terletak pada transparansi sumber dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kemitraan.

2. (Praseasa dan Widari, 2019) dengan judul penelitian “Daerah Industri Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan Penguatan Kelembagaan di Daerah Terunyan Bali” Dimana akibat dari tipu muslihatnya terungkap bahwa:

- a. Sistem penguatan yang diterapkan oleh Pengelola Daerah Wisata dapat diketahui bahwa dengan memanfaatkan model kesesuaian yang hidup kesamaan antara tiga komponen, yaitu program aktual, pelaksanaan program dan program kelompok sasaran.
- b. Kemitraan dalam pengembangan Desa wisata sebagai empat contoh asosiasi, khususnya: (a) komunikasi antara kota pembentukan kawasan lokal dan kota Pariwisata. (b) kerjasama antara otoritas publik (daerah, sub-lokal dan kota) dengan kota-kota wisatawan. (c) kerjasama antara pelaku industri perjalanan wisata di kota tenang dengan kota wisata. selanjutnya (d) komunikasi antara kepala kota wisatawan dengan kota wisatawan tenang.
- c. Model penguatan kelembagaan untuk membantu kemajuan kota wisata dapat diketahui bahwa melalui (a) pelibatan seluruh lapisan masyarakat kota dan yayasan-yayasan lokal di kota yang bersangkutan untuk mendukung peningkatan kota wisata berbasis sosial; dan (b) menghidupkan Kembali perkumpulan (sekaha) yang memproduksi barang-barang industry perjalanan untuk membentengi kemajuan kota-kota pelancong.

3. (Dwi Sarwani Sri Rejeki dan Dwita Darmawati, 2021) dengan judul penelitian “Program Kemitraan Masyarakat: Desa Baseh Desa Wisata yang Sehat” mengemukakan bahwa:

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra Desa Baseh, desa wisata yang sehat di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik, dan hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pentingnya kebersihan dan kenyamanan di lokasi wisata bagi masyarakat, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang cara pengolahan dan penyajian makanan bagi pelaku penjamah makanan, serta pemenuhan sarana dan prasarana di lokasi wisata berupa bangunan MCK, tempat sampah, dan pesan kesehatan kepada masyarakat berupa spanduk dan poster.

Sebagai kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yaitu:

Persamaan: pada ketiga penelitian terdahulu memiliki persamaan fokus penelitian dengan penelitian yang saya akan lakukan. Adapun persamaan lainnya yaitu pada penelitian (Setianingsih, 2018) dan penelitian (wardoyo,2020) menggunakan indikator keberhasilan kemitraan. Pada ketiga penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan observasi, pada penelitian (Praseasa dan Widari, 2019) dengan penelitian (wardoyo,2020) memiliki kesamaan yaitu Teknik penentuan informan yaitu (purposive sampling).

Perbedaan: pada ketiga penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada lokus penelitian dengan penelitian ini, pada penelitian (setianingsih, 2018) menggunakan Teknik penentuan informan yaitu campuran antara kualitatif dan

kuantitatif (*mixed method*). Pada penelitian (Praseasa dan Widari, 2019) terdapat perbedaan lokus penelitian. Pada penelitian (Wardoyo, 2020) terdapat perbedaan lokus penelitian, indikator penelitian serta perbedaan pada menggunakan Teknik pengumpulan data.

Dengan demikian untuk lebih jelas dituliskan dalam bentuk tabel persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Fokus Persamaan	Fokus Perbedaan
1.	(Setianingsih, 2018) dengan judul penelitian “organisasi antara kota di kota Jimus dan kota Ngaran dalam program Pamsimas”	1. Fokus penelitian 2. Indikator kemitraan 3. Teknik prngumpulan data (Observasi)	1. Lokus penelitian 2. Metode penelitian campuran antara kualitatif dan kuantitatif (<i>Maxid Method</i>)
2.	(Praseasa dan Widari, 2019)	1. Fokus	1. Lokus

	dengan judul penelitian “Daerah Industri Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan Penguatan Kelembagaan di Daerah Terunyan Bali”	Penelitian 2. Teknik penentuan informan (Purposive sampling) 3. Jenis penelitian Kualitatif	penelitian
3.	(Dwi Sarwani Sri Rejeki dan Dwita Darmawati, 2021) dengan judul penelitian “Program Kemitraan Masyarakat: Desa Baseh Desa Wisata yang Sehat”	1. Fokus penelitian 2. Jenis penelitian Kualitatif 3. Teknik penentuan informan (purposive dan snowball) 4. Teknik pengumpulan data (Observasi)	1. Lokus penelitian 2. Teknik pengumpul an data Triangulasi

B. Teori dan Konsep

1. Konsep Kemitraan

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995, Kemitraan dapat diketahui bahwa suatu penyertaan usaha antara usaha-usaha mandiri dengan organisasi-organisasi menengah atau organisasi-organisasi besar yang tergabung dalam pembinaan dan pembinaan oleh pusat atau organisasi besar dengan menitikberatkan pada standar kebutuhan bersama, penguatan bersama dan keuntungan bersama.

Menurut Tugimin, kemitraan dapat diketahui bahwa gerakan atau upaya yang diselesaikan oleh beberapa pertemuan dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada hanya diselesaikan.

Para ahli berpendapat bahwa kemitraan merupakan hubungan antara dua perkumpulan atau lebih yang ditujukan untuk mencari keuntungan di mana salah satu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lain namun membentuk hubungan yang mengusulkan keduanya dalam pandangan persetujuan untuk mencapai suatu tujuan. Asosiasi bisnis terkenal yang berbakat sedang dikembangkan bantuan pemerintah individu.

Kemitraan tersebut dikenal dengan partisipasi bersama atau kerjasama dari berbagai perkumpulan, baik secara eksklusif maupun berkelompok. Menurut Notoatmodjo, perkumpulan dapat diketahui bahwa kerjasama yang tepat antara orang-orang, perkumpulan atau perkumpulan untuk mencapai pengaturan atau tujuan tertentu.

Seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad Jafari Hafsa, kemitraan dapat diketahui bahwa metodologi bisnis yang diselesaikan dengan dua pertemuan atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat di samping pedoman kebutuhan bersama dan saling memperluas.

Lan Lion mengatakan bahwa Kemitraan dapat diketahui bahwa sikap mengarahkan organisasi yang digambarkan oleh koneksi jarak jauh, kolaborasi gedung tinggi, kepercayaan bersama, di mana penyedia dan klien satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Kunci keberhasilan dalam memberikan kesempatan untuk bekerja pada pekerjaan perusahaan independen dapat diketahui bahwa dengan memainkan program organisasi dimana pemerintah Indonesia untuk situasi ini Presiden telah mengatur program asosiasi pada tanggal 14 Januari 1991. Program Kemitraan melalui hubungan antara lift dan rekan mengarahkan hubungan usaha bersama antara organisasi besar dan organisasi menengah dengan perusahaan independen.

Kemitraan merupakan kerjasama, keseimbangan, persekutuan deviden dan organisasi yang terguling untuk kemajuan timbale balik antara pihak-pihak yang bersatu padu dalam menyelesaikan administrasi yang bersahabat (Adisasmita, 2010:150). Paguyuban dalam substansinya dikenal dengan kerjasama atau partisipasi bersama dari berbagai perkumpulan, baik secara mandiri maupun perkumpulan. Seperti yang ditunjukkan oleh Notoatmodjo (2003), Kemitraan dapat diketahui bahwa partisipasi yang tepat antara orang-orang, pertemuan atau asosiasi hierarkis untuk menyelesaikan suatu usaha atau alasan tertentu.

Ada perbedaan pengertian kemitraan secara keseluruhan (Dukungan Kementerian Kesehatan RI) antara lain:

- a. Kemitraan berisi pemahaman tentang koneksi dan interelasi yang dapat diabaikan antara dua belah pihak atau lebih di mana masing-masing pihak dapat diketahui “Mitra” atau “Partner”
- b. Kemitraan dapat diketahui bahwa siklus penyelidikan/lambang keselarasan yang umumnya menguntungkan dan struktur instruktif bersama untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan dapat diketahui bahwa suatu pekerjaan untuk mengikutsertakan bagian-bagian yang berbeda dari dua bidang, pertemuan-pertemuan lokal, yayasan-yayasan pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama berdasarkan pengaturan, standar, dan pekerjaan masing-masing.
- d. Kemitraan dapat diketahui bahwa pemahaman di mana seorang individu, pertemuan atau asosiasi untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan dan memisahkan tugas, menanggung bersama sebagai bahaya dan manfaat, mengaudit koneksi khusus mereka dan memperbaiki pengaturan jika perlu.

Kepentingan tersebut dapat dipisahkan dengan penyebaran spekulasi, bahaya, kewajiban dan ganti rugi antara perkumpulan yang bersangkutan. Alasan yang mendasari diselenggarakannya Kemitraan antara lain berkaitan dengan adanya pembiayaan (moneter), perencanaan, pengembangan, kegiatan dan kepedulian bantuan masyarakat dan administrasi. Bournemouth (2006) juga

merekomendasikan bahwa Kemitraan merupakan soslusi yang tepat untuk mengatasi masalah eksekusi atas pengaturan yang dianggap sulit ditangani oleh otoritas publik.

Karakteristik Kemitraan oleh Bournemouth (2006) meliputi:

1. Kejelasan dan objektivitas
2. Kewajiban Kemitraan
3. Kejelasan dalam pekerjaan dan kewajiban
4. Keseimbangan pekerjaan di antara individu-individu yang tertarik pada asosiasi
5. Kehadiran tingkat pengembalian yang tidak dapat disangkal pada setiap bagian
6. Administrasi yang solid
7. Perencanaan yang Jelas (Clear Plan)
8. Korespondensi yang bagus
9. ID aset yang bagus

Terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun suatu Kemitraan oleh setiap individu dan anggota Kemitraan (Notoatmodjo 2003), antara lain:

1. Prinsip Kesetaraan

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalani kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

2. Prinsip Keterbukaan

Transparansi terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh

anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3. Prinsip asas manfaat bersama

Individu, organisasi atau intitusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

a. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan menurut Subanar (1997:14), adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan menurut Muhammad Jafar Hafsah (2000:63) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

b. Pola-pola Kemitraan

Dalam proses implementasinya, kemitraan yang dijalankan tidak selamanya ideal karena dalam pelaksanaannya kemitraan yang dilakukan didasarkan pada kepentingan pihak yang bermitra. Menurut Wibisono (2007:104), Kemitraan yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah maupun komunitas/ masyarakat dapat mengarah pada tiga pola, diantaranya:

1. Pola kemitraan kontra produktif Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan shareholders yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus perhatian perusahaan memang lebih bertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak memiliki akses apapun kepada perusahaan. Hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman ditengah masyarakat. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan hanyalah digunakan untuk memelihara orang-orang tertentu saja. Hal ini dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan dalam jangka pendek.
2. Pola Kemitraan Semiproduktif. Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program- program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia

usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihakpemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau *public relation*, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan Bersama (*commont interest*) antara perusahaan dengan mitranya.

3. Pola Kemitraan Produktif, Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership program*.

c. Model-Model Kemitraan

Model-model Kemitraan menurut (Sulistiayani 2014) di bawah ini:

1. *Pseudo Partnership*, atau Kemitraan semu.

Kemitraan Semu dapat diketahui bahwa kemitraan yang terjadi antara dua pertemuan atau lebih, namun sebenarnya tidak berkoordinasi secara baik

satu sama lain. Bahkan pada satu pihak belum tentu bisa memahami secara benar makna sebuah Kemitraan. Untuk apa suatu tujuan dilakukan dan diselesaikan. Ada keunikan dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua pihak atau lebih bersama-sama merasa perlu untuk berkoordinasi, namun pihak-pihak yang bermitra tidak benar-benar memahami substansi yang diperjuangkan dan apa manfaatnya.

Kemitraan Semu semacam ini tampaknya terjadi dalam contoh perbaikan yang diselesaikan pada masa Orde baru, yang secara teratur dikaitkan melalui semboyan "maju dari dan oleh otoritas publik untuk individu". Orang-orang yang bermain sebagai kaki tangan pekerjaan pemerintah tidak tahu sama sekali apa pentingnya ini, meskipun mereka percaya bahwa itu penting.

2. *Mutualism Partnership*, atau Kemitraan Mutualistik.

Kemitraan Mutualistik dapat diketahui bahwa persekutuan setidaknya dua perkumpulan yang sama-sama memperhatikan bagian penting dari perkumpulan, khususnya untuk memberi manfaat dan mendapatkan lebih banyak keuntungan, sehingga mereka benar-benar ingin mencapai tujuan yang lebih ideal. Berangkat dari pemahaman tentang pentingnya melakukan asosiasi, dua spesialis/perkumpulan atau lebih yang memiliki status yang sangat mirip atau berbeda, berkoordinasi. Keuntungan antara pihak-pihak dalam usaha bersama dapat diperoleh, sehingga lebih mudah bagi masing-masing dalam memahami mimpi dan misi mereka, dan sekaligus saling mendukung.

3. *Conjugation Partnership*, Kemitraan melalui pelebaran dan pengembangan

Kemitaan Konjugasi dapat diketahui bahwa Kemitraan yang mirip dengan keberadaan "Paramecium". Dua paramecium dibentuk untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan kemudian dapat melakukan pembelahan diri. Menarik diri dari hubungan ini, asosiasi, spesialis, pertemuan atau orang-orang yang memiliki kekurangan dalam menjalankan pekerjaan atau mencapai tujuan masing-masing. Pada ranah kebijakan, Kemitraan dengan model ini. Kedua pihak tersebut dapat melakukan Konjugasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antar organisasi, bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut pusat promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI dalam Kuswindanti (2008) yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan sponsorship. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam:

- a. SK Bersama
- b. MoU
- c. Pokja
- d. Forum Komunikasi
- e. Kontrak Kerja/perjanjian kerja

Untuk dapat mengetahui pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur, selain itu melalui indikator pengembangan kemitraan dapat diketahui pula apakah model kemitraan

yang diterapkan sudah berjalan dengan baik. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator keberhasilan kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008) dijelaskan sebagai berikut:

1) Input

Indikator:

- a. Pembentukan tim yang ditandai adanya kesepakatan Bersama dalam kemitraan
 - b. Adanya sumber dana untuk kemitraan
 - c. Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati
- 2) Proses, Indikator: Frekuensi dan kualitas pertemuan sesuai kebutuhan.
- 3) Output, Indikator: Jumlah kegiatan yang sesuai dengan peran masing-masing.
- 4) Outcome, Indikator: adanya penurunan masalah.

Dalam penelitian mengenai model kemitraan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa menggunakan teori pengembangan Indikator keberhasilan kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008) agar lebih mudah mengidentifikasi masalah penelitian.

d. Manajemen

Fungsi manajemen menurut Hamdan (1989:9) adalah kegiatan merumuskan tujuan, menentukan strategi menyeluruh tentang cara bagaimana

melaksanakan tugas mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut, menetapkan hirarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Suherman (2002:2) menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha para anggota, organisasi dan penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Sementara G.R Terry (dalam Hardyanti 2012:16) menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen meliputi, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Dari penjabaran mengenai pengertian menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses pengelolaan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Berikut penjabaran dari fungsi manajemen menurut G.R Terry:

a. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam Sukarna, (2011:10) mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut:

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”.(Perencanaan merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta

serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan).

Terry (2008:46) mengatakan bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan perencanaan (*planning*) merupakan suatu pendekatan yang terorganisir untuk menghadapi berbagai problema dimasa yang akan datang dan mengembangkan rancangan kegiatan hari ini untuk tindakan dimasa mendatang. Planning menjadi jembatan antara posisi sekarang dengan tujuan yang akan dicapai.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam Sukarna(2011: 38) mengemukakan tentang organizing sebagai berikut:

“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity”. (Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan).

Dalam pengorganisasian tentunya haruslah memiliki prinsip sebagai acuan pembagian organisasi menurut Henry Fayol dalam Wursanto (2003) mengemukakan (14) empat belas prinsip organisasi yaitu:

1. pembagian kerja (*division of work*),
2. wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*),
3. disiplin (*discipline*),
4. kesatuan komando (*unity of command*),
5. kesatuan langkah (*unity of direction*),
6. subordinasi minat dibawah minat pada umumnya (*subordination of individual interest to general interest*),
7. pemberian hadiah (*remuneration*),
8. sentralisasi atau pemusatan (*centralization*),
9. jenjang hirarki (*line of authority/hierarchy*),
10. ketertiban (*order*),
11. kesamarataan (*equity*),
12. stabilitas jabatan pegawai (*stability of personnel*),
13. inisiatif (*initiative*) dan
14. kesatuan jiwa korps (*esprit de corps*).

Dalam pelaksanaan suatu organisasi tentunya haruslah melewati beberapa proses pengorganisasian, menurut T. Hani Handoko dalam Musbandi (2015:15) proses pengorganisasian dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur sebagai berikut:

- a) Pemerincian seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapaitujuan organisasi.
 - b) Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja ini sebaiknya tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan.
 - c) Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis.
- c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam Sukarna, (2011:82) mengatakan bahwa:
“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”. (Penggerakan merupakan upaya membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan).

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasaran, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasaran hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap *tools of management*.

Hal ini sudah barang tentu merupakan mis- management. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada *planning* dan *organizing* yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju. Penggerakan tanpa *planning* tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. Faktor yang diperlukan dalam penggerakan menurut G.R Terry dalam Sukarna (2011: 82-83) yaitu:

- 1) *Leadership* (Kepemimpinan)
 - 2) *Attitude and morale* (Sikap dan moril)
 - 3) *Communication* (Tatahubungan)
 - 4) *Incentive* (Perangsang)
 - 5) *Supervision* (Supervisi)
 - 6) *Discipline* (Disiplin).
- d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala

kegiatan agar tertuju kepada sarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry dalam Sukarna, (2011: 110) mengemukakan bahwa *Controlling* yaitu:

“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”. (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard atau ukuran).

Terry dalam Sukarna, (2011: 116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut yaitu:

- 1) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
- 2) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
- 3) *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
- 4) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

2. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

SDGs merupakan program yang disepakati sebagai agenda global PBB oleh para pemimpin dunia dari 193 negara di dunia secara resmi pada 25 september 2015 disusun atas komitmen masyarakat internasional yang menjadi sebuah tonggak baru pembangunan tiap negara, guna meneruskan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), untuk kehidupan masyarakat yang lebihbaik. Kemudian dibentuk agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagaikesepakatan pembangunan global.

Menurut Internasional NGO Forum Indonesia Development/INFID (2019: 9) ialah “SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru, yang mendorong perubahan-perubahan agar bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Secara keseluruhan SDGs isinya mencakup 17 tujuan, 169 target yang berlaku sejak 2016 hingga tahun 2030”.

Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan perkembangan negaranegara di seluruh dunia, baik negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan serta ketimpangan) ataupun negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, ketersediaan air minum dan sanitasi). MDGs disempurnakan sebab hanya bertujuan mengurangi setengah dari tiap masalah pembangunan sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan. Secara proses MDGs memiliki kelemahan karena pada penyusunan hingga implementasinya cukup eksklusif dan sangat birokratis tanpa

melibatkan peran stakeholder non pemerintah, akademisi, sektor bisnis dan swasta, *Civil Society Organization*, serta kelompok lainnya. Untuk itu SDGs hadir dengan harapan dapat mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs, dan menargetkan penyelesaian tuntas terhadap pembangunan, sehingga tiap-tiap Negara memiliki peran dan tanggungjawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam pencapaian SDGs.

Konsep SDGs pertama kali lahir pada kegiatan konferensi pembangunan global yang dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang dihasilkan dalam pertemuan beberapa kepala Negara tersebut memperoleh tujuan yang bersifat pembangunan secara universal yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2030. Di Indonesia SDGs ini kemudian dimulai sejak ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks nasional, SDGs menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan pengurus dalam semua kebijakan dan program pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, mulai tingkat nasional sampai level desa dimana SDGs Desa sudah menjadi agenda pembangunan daerah paling utama.

Menurut Iskandar (2020:100-101) konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama, yaitu:

Pertama, pilar sosial. Berorientasi pada pembangunan manusia (*human development*) secara berkualitas, adil, setara, peningkatan kesejahteraan

seperti pendidikan dan kesehatan; Kedua, pilar ekonomi. Berorientasi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan kemitraan. Lingkungan sosial ekonomi (*social economic development*) seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan; Ketiga, pilar lingkungan (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya, SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

Dalam menyeimbangkan ketiga dimensi pembangunan tersebut, maka untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan adalah dengan dukungan pilar hukum dan tata kelola yang menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif pada semua tingkatan. Sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan

desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa.

Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat

desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat di harapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa.

Disisi lain pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkup yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa menyanggah peran dalam mengupayakan terciptanya atmosfir yang dapat mendorong kemauan masyarakat untuk bekerja sama membangun pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic perubahan.

Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional³³. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan

keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa merupakan satu kesatuan dari undang-undang kelompok masyarakat yang mempunyai batas wilayah, yang ahli untuk mengatur dan mengurus kepentingan lingkungan wilayah setempat sejak awal, dan tradisi-tradisi sekitarnya yang dirasakan dan/atau dibingkai dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan berada di wilayah/kota sebagaimana dimaksud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Nomor 32 Tahun 2004, Mengakui Otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau dalam hal apapun dan kepada kota melalui pemerintah Desa dapat diberikan tugas atau penunjukan dari badan publik atau pemerintah terdekat untuk melakukan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai Perwujudan Demokrasi sesuai pengaturan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibingkai oleh Badan Pasmusyaariaan Daerah (BPD) atau penugasan lain yang diubah sesuai dengan budaya yang ada. dibuat di kota yang bersangkutan, apa fungsinya sebagai lembaga administrasi dan pengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti pengembangan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa sebagai bentuk Lembaga perusahaan

daerah yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Selanjutnya pemerintah Desa dapat diketahui bahwa kepala Desa Bersama perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Kepala Desa dalam tujuannya dapat diandalkan oleh warga yang dalam sistem dan metodologi pertanggungjawabannya diserahkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Daerah, Kepala Desa harus memberikan data laporan kewajiban dan kepada individu untuk menyampaikan data Kepala Desa, namun pada saat yang sama perlu membuka pintu kepada daerah setempat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk bertanya dan/ atau meminta data tambahan tentang kewajiban informasi. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV Pasal 11 Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan BPD.

Kemudian, pada saat itu, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pengertian Desa, lebih spesifiknya Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk menguasai dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang di akui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Pemerintah Desa ini tentunya disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai komponen koordinator Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Daerah yang pasti disebut dengan nama lain (BPD), dapat diketahui Lembaga yang merupakan

indikasi kekuasaan pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Desa dan sebagai komponen penyelenggaraan pemerintah kota.

b. Pengertian Desa

Secara etimologis kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berarti negara, tempat yang dikenal asal mulanya, atau tanah kelahirannya. Desa dapat diketahui bahwa sebagai suatu solidaritas kelompok masyarakat hukum yang mempunyai kekuatan untuk mengurus keluarganya sendiri yang didirikan atas titik tolak keistimewaan dan adat-istiadat yang dirasakan dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten tersermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sebagaimana dikemukakan oleh Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa: "Desa dapat diketahui bahwa sebagai suatu kesatuan kelompok masyarakat hukum yang mempunyai tindakan pertama mengingat keistimewaan permulaan yang luar biasa. Landasan pemikiran dalam pemerintahan kota dapat diketahui bahwa keragaman dukungan, kemandirian yang unik, demokratisasi dan penguatan daerah."

Diperkenalkannya peraturan Desa telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk bekerja pada sifat administrasi pengaturan ke daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat, oleh karena itu Desa dapat diketahui bahwa suatu kesatuan kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas kekuasaan untuk mengurus dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan lingkungan daerah setempat dengan memperhatikan penggerak daerah setempat, kebebasan memulai, dan/atau hak-hak istimewa adat yang dirasakan dan diperhatikan dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Kemitraan untuk mewujudkan kesejahteraan perekonomian Desa sebagai tujuan SDGs. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi masyarakat menjadi lebih baik.

Untuk mengukur keberhasilan kemitraan maka penulis menggunakan empat indikator kemitraan menurut Ditjen P2L dan PM dalam Kuswidanti (2008:22) sebagai berikut:

1. Indikator input

Tolok ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:

- a. Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan,
- b. adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan, dan
- c. adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait.

2. Indikator Proses

Tolok akur keberhasilan proses dapat diukur dari frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. Indikator proses

penelitian model kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan hutan mangrove dilakukan dengan menggunakan fungsi manajemen menurut G.R Terry (dalam Hardyanti 2012:16) meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

3. Indikator Output

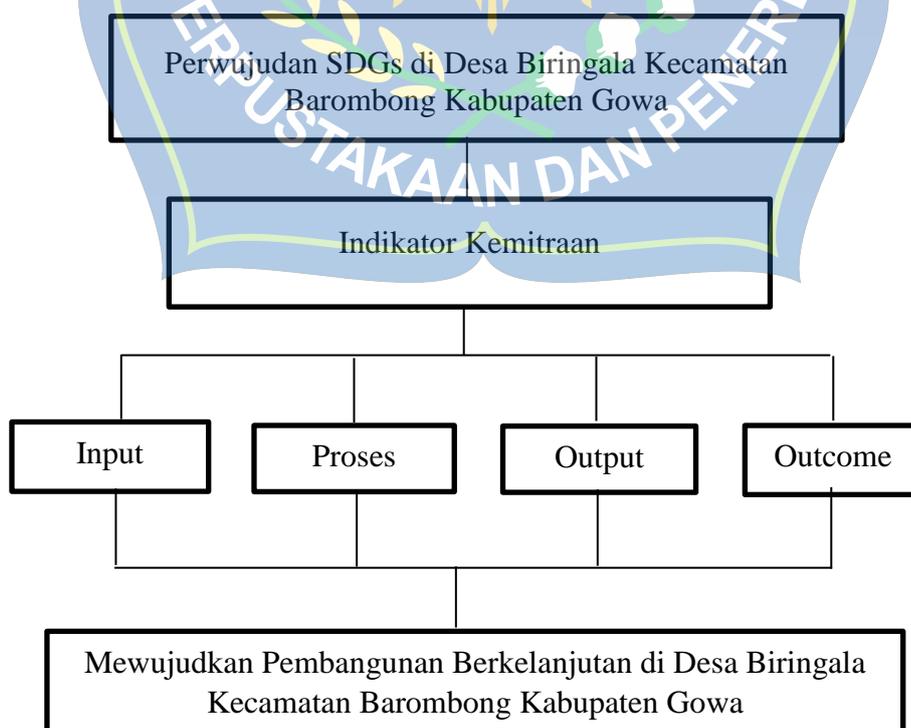
Tolok ukur keberhasilan output dapat dilihat dari hasil program-program yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi.

4. Indikator Outcome

Tolok ukur keberhasilan outcome dapat dilihat dari dampak yang diberikan masing-masing institusi.

Dalam hal ini peneliti jelaskan melalui gambar kerangka berpikir dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Titik fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kemitraan pemerintah Desa Biringgala dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan dikaji dengan empat indikator kemitraan yaitu: Input, Proses, Output, dan Outcome. Kemitraan yang dilakukan adalah upaya terpadu dalam pengembangan program pemerintah sehingga dapat mengatasi masalah pembangunan yang terjadi di masyarakat.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, Adapun penelitian tentang Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringgala yaitu menggunakan indikator Kemitraan dari Ditjen P2L dan PM dalam Kuswidanti terdapat empat indikator kemitraan sebagai beriku:

1. Indikator Input

Tolok ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:

- a. Terbentuknya tim yang ditandai dengan adanya kesepakatan Bersama dalam kemitraan, Dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah yang melihat berdasarkan pada teori pengembangan indikator. Beberapa permasalahan tersebut yaitu kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah dalam penyesuaian penyusunan rencana pengelolaan kemitraan Desa Biringgala. Kerjasama maupun kemitraan harus dibangun antar aktor agar dapat segera mencetak Desa Wisata yang berdaya jual dengan cara melibatkan seluruh pihak agar turut berpartisipasi dalam pengelolaan Desa Wisata. Pada saat ini pihak yang

bertanggungjawab dalam pengelolaan Desa Wisata Biringgala adalah BUMDes dan POKDARWIS.

- b. Adanya sumber dana/biaya yang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan, kerja sama BUMDes dengan POKDARWIS Desa Biringgala pihak pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000. Mengenai Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan kemitraan belum sesuai dengan prioritas. Pengelolaan dan pengembangan Kemitraan Desa Biringgala masih cukup minim bahkan dalam situasi pandemik Covid-19 tidak ada dana untuk pembangunan fisik.
- c. Adanya Dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi yang terkait, terdapat bukti dokumen perencanaan dalam pengelolaan kemitraan seperti SK Bersama, Pokja, Perjanjian Kerja, forum komunikasi.

2. Indikator Proses

Kemitraan Desa Biringgala sudah baik namun tidak adanya keterlibatan masyarakat Desa Biringgala didalam proses perencanaan hingga pengelolaan ini menjadi masalah serius dalam kemitraan tersebut karena akan menimbulkan perasaan tidak peduli terhadap sesama.

3. Indikator Output

Masalah lainnya yang terjadi di Desa Biringgala yaitu tidak terlibatnya masyarakat dalam perumusan rencana karena hanya dilakukan oleh pengelola BUMDes dan POKDARWIS. Selain itu, yang harus

ditingkatkan pula yaitu keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Karena akan percuma apabila tingkat keterlibatan masyarakat sudah baik namun tidak diimbangi dengan keaktifan masyarakat dalam penyampaian saran dan kritik terhadap berjalannya kemitraan tersebut.

4. Indikator Outcome

Dalam Pengelolaan kemitraan Desa Biringala membutuhkan dana yang cukup besar dari pihak pemerintah Desa Biringala, karena pengelolaan kemitraan Bersama BUMDes dan POKDARWIS memiliki keterbatasan dalam hal permodalan.

Teori pengembangan indikator keberhasilan digunakan untuk menganalisis masalah penelitian dimana dalam pengembangan indikator tersebut terdapat beberapa indikator yakni input, proses, output, dan outcome. Melalui indikator proses dapat dilihat model kemitraan pengelolaann yang selama ini dilakukan. Kemudian dari keseluruhan indikator akan kita ketahui sejauh mana keberhasilan kemitraan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai pada tanggal 27 April-27 Juni 2022. Lokasi penelitian berada di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa karena peneliti melihat masih banyak permasalahan– permasalahan yang belum bisa diatasi terkait Kemitraan Desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu adanya pengembangan potensi masyarakat Desa Biringgala dalam mengelola Kemitraan agar kiranya bisa menghasilkan penghasilan asli desa (PAD) bagi Desa Biringala.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, karena menggambarkan pelaksanaan Analisis Kemitraan di Desa Biringala. Penelitian kualitatif dapat diketahui bahwa penelitian yang berencana untuk memahami kekhasan apa yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian seperti perilaku, inspirasi, wawasan, aktivitas, dan sebagainya secara komprehensif, dan melalui penggambaran sebagai kata-kata dan Bahasa, dalam pengaturan regular yang luar biasa dan dengan menggunakan strategi normal yang berbeda.

Jenis penelitian ini jelas merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Alasan peneliti menggunakan penelitian semacam ini dapat diketahui bahwa ingin menggambarkan suatu masalah. Strategi penelitian subyektif yang jelas

dapat diketahui bahwa Teknik yang digunakan oleh analisis untuk melacak informasi atau hipotesis penelitian pada waktu tertentu.

Saksi-saksi penelitian ini akan dikonsultasikan untuk mencari solusi terkait dengan Analisis Kemitraan di Desa Biringala. Saksi-saksi dalam penelitian ini memanfaatkan penelitian purposive sampling.

C. Informan

Adapun Informan pada penelitian untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan Analisis Kemitraan di Desa Biringala, Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan

Nama	Jabatan
Muhammad Anwar	Kepala Desa
Nurhidayat	Sekretaris Desa
Abd. Rais	Ketua BUMDes
Munadiyah Agmarinha S.E	Sekretaris BUMDes
Ikhlasul Amal	Bendahara BUMDes
M. Syamsul Bahri S.Pd, M.Pd	Ketua POKDARWIS
Andi Sofyandi, S.Pd	Sekretaris POKDARWIS
Mansur Dg Nai	Pengelola Unit Usaha
Jamaluddin Dg Majja'	Penjaga Keamanan

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah teknik yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data kualitatif.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik yang dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa dalam bentuk arsip foto, arsip surat, jurnal, buku harian, notulen rapat, dan lain sebagainya yang ada di Kantor Desa Biringala.

2. Wawancara

Jika tidak ada dokumen yang bisa dijadikan sumber data, maka peneliti bisa melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang dianggap bisa memberikan informasi terkait judul penelitian. Narasumber yang dipilih seperti pemerintah desa dan masyarakat sebagai sampel

3. Observasi

Observasi adalah sudut pandang langsung yang ditujukan membandingkan hasil yang diperoleh melalui literatur yang ada dan apa yang sedang terjadi di lapangan. Pengamatan ini dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan dan mencatat fenomena yang terjadi.

E. Teknik Analisis Data

Proses penyelidikan atau analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan empat teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen sebagai bahan penelitian ini.

2. Reduksi Data

Tahap penurunan informasi atau tahap mengurangi dan memperbaiki informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tentunya tidak sulit untuk mendapatkan data. Informasi yang didapat dari observasi langsung ke lapangan, wawancara, studi dokumen di kantor Desa Biringala, secara tidak langsung memiliki struktur yang membingungkan oleh karena itu perlu dilakukan pengurangan data sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Penyajian Data

Setelah menyelesaikan tahap penurunan, kemudian memasuki tahap penyajian informasi. Pada tahap ini peneliti memperkenalkan informasi yang telah dikurangi atau disederhanakan pada tahap yang lalu dengan menyusun sekumpulan informasi sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Tahap penyajian data ini bertujuan untuk menyeleksi atau spesifikasi fokus permasalahan penelitian, data yang disajikan sesuai dengan permasalahan penelitian di Desa Biringala.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini yaitu membuat kesimpulan. Sehingga informasi yang telah dikumpulkan dan dirangkai kemudian diberikan cara atau contoh, ujung-ujungnya dapat ditarik. Ujung ini menjadi data yang dapat dimasukkan dalam laporan penelitian dan ditetapkan di bagian akhir. Untuk lebih spesifik di area akhir, dengan tujuan agar pembaca laporan penelitian juga dapat memahami tujuan dari penelitian ini.

F. Teknik Pengabsahan Data

Untuk memastikan tingkat keabsahan data dari penelitian ini maka digunakan beberapa teknik Triangulasi seperti berikut:

1. Triangulasi Sumber

Yaitu peneliti memiliki sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik yang sama, dengan demikian apakah data yang didapatkan akan sama ataupun sebaliknya.

2. Triangulasi Teknik

Jika sebelumnya peneliti mengumpulkan data dengan teknik yang sama dari sumber yang berbeda maka pada tahap ini peneliti menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama agar data yang didapatkan benar-benar tidak diragukan lagi.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil akhir penelitian dengan teori perspektif teori yang menjadi rujukan indikator dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gowa terkait Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) tepatnya di Kantor Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini juga akan memaparkan tentang profil Kabupaten Gowa.

1. Gambaran Geografis dan Administrasi Kabupaten Gowa

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Gowa



Sumber: humas.gowakab

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah Kabupaten/Kota yang terletak di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi merupakan daerah otonom ini, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2. Sejarah dan perkembangan Desa Biringala

Pada awalnya Desa Biringala merupakan Desa hasil pemekaran dari desa Moncobalang yang terbentuk pada tahun 1989 yang sekaligus sebagai desa persiapan yang dipimpin oleh bapak Abd. Majid Kasman. Desa Biringala dibentuk atas dasar musyawarah dari berbagai unsur masyarakat dan dari hasil musyawarah tersebut maka diberi nama desa itu Biringala. Kemudian desa biringala sebelumnya adalah merupakan desa persiapan sejak tahun 1989 sampai dengan 1992 dan tahun 1993 menjadi desa Defenitif.

Selanjutnya pada tahun 1994 di adakan pemilihan kepala desa biringala yang mana pemilihan kepala desa ini ada 4 calon kepala desa yaitu : Abdullah Nyomba, Abd. Majid Kasman, Passe'reang Dg. Bantang dan Abd. Samad Dg. Salle.

Kemudian dari hasil pemilihan tersebut yang terpilih adalah Abd. Majid Kasman yang sebelumnya adalah kepala desa persiapan biringala. Dan pada tahun 2003 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya dan dari hasil pemilihan tersebut yang terpilih adalah Abdullah Nyomba, untuk periode 2003 sd 2008. Dan selanjutnya pada tahun 2008 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa untuk periode 2008 sd 2014 dengan 2 Calon Kepala Desa yang akan dipilih Yakni: H. Abdullah Dg. Nyomba dan Makmur Dg. Ngesa.

Dan dari pemilihan tersebut yang berhasil meraih suara terbanyak adalah H. Abdullah Dg Nyomba, selanjutnya tahun 2013 diadakan lagi pemilihan Kepala Desa Biringala untuk priode 2013-2019 yang diikuti oleh 4 Orang Calon Kepala Desa yakni: Anwar Dg Situju, Firman. M. S.Pd, Makmur Dg Ngesa dan Mustakim Lawa. Kemudian dari hasil emilihan Kepala Desa tersebut yang berhasil meraih suara terbanyak dan sekaligus terpilih sebagai Kepala Desa Biringala adalah Firman M. S.Pd.

Kemudian pada tahun 2019 diadakan pemilihan kepala Desa Biringala periode 2019-2025 yang diikuti oleh 2 calon kepala desa yaitu: Anwar Dg Situju dan Firman. M. S.Pd. Kemudian dari hasil pemilihan Kepala Desa tersebut yang berhasil meraih suara terbanyak dan sekaligus terpilih sebagai

Kepala Desa Biringala adalah Anwar Dg Situju dan masih menjabat sampai sekarang.

3. Perkembangan Pembangunan Desa Biringala

Perkembangan pembangunan Desa Biringala Perkembangan pembangunan di Desa Biringala untuk 3 tahun terakhir terutama untuk pembangunan fisik yaitu di tahun 2019 tidak terdapat pembangunan fisik karena terjadi pengurangan anggaran yang dialihkan ke dana pandemik akibat wabah virus corona19. Pembangunan hanya dilakukan pada bidang bantuan sosial dengan adanya program pemerintah dari tahun 2019 yang dikeluarkan untuk masyarakat yang terdampak covid yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan sumber dana dari Anggaran Dana Desa.

Tahun 2020 masih sama seperti pada tahun 2019 karena masih dalam situasi pandemic, di tahun 2020 Anggaran dana desa dialihkan ke pembangunan Desa Wisata yang akhirnya pemerintah Desa Biringala membangun Desa Wisata yang diberi Nama Kampung Rewako Desa Biringala.

Kemudian di tahun 2021 mulai dilakukan pembangunan fisik kembali fasilitas public yaitu pembangunan jalan lingkar yang ada di Dusun Ballaparam yang mulai dikerjakan akhir tahun 2021- 2022 dan masih dalam proses sampai sekarang.

4. Kondisi Wilayah Desa Biringala

a. Geografis

1) Letak dan Luas Wilayah

Desa Biringala adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Barombong yang terletak di Ujung Selatan Kecamatan Barombong dengan luas Wilayah 278,63 Ha atau 2,79 Km² yang berbatasan:

Sebelah utara : Desa Moncobalang
 Sebelah Timur : Desa Bone Kec. Bajeng
 Sebelah Selatan : Desa Kalemandalle Kec. Bajeng Barat
 Sebelah Barat : Desa Tamasaju/Kelurahan Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

2) Iklim

Iklim Desa Biringala sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Biringala Kecamatan Barombong.

3) Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

a) Jumlah Penduduk

Desa Biringala mempunyai jumlah penduduk 3.193 Jiwa yang tersebar di 3 Dusun dengan perincian sebagai berikut:

Table 4.1 Jumlah Penduduk

No.	Dusun	JUMLAH		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Ballaparang	504	539	1.043
2.	Bontobila	372	409	781
3.	Biringkanaya	641	674	1.315
		1.517	1.622	3.139

b) Pola Penggunaan Tanah/Lahan

Penggunaan tanah/lahan di Desa Biringala sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang peruntukkannya untuk bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya.

Table 4.2 Luas Lahan Pengairan, Tadah Hujan & Pekarangan

No.	Lahan Pengairan	Luas (Ha)
1.	Sawah pengairan tekhnis	215 Ha ²
2.	Sawah pengairan setengah tekhnis	20 Ha
3.	Sawah tadah hujan	9 Ha
4.	Pekarangan	34 Ha
		278 Ha

c) Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Biringala secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Sarana Perhubungan

Jalan Aspal	Jalan Perkerasan	Jalan Paving Blok	Jalan Tanah	Lorong
2000 M	350 M	1600 M	400 M	500

Tabel 4.4 Sarana Pelayanan Umum

Balai Desa	Puskesmas	Pustu	Posyandu
1	-	1	7

Tabel 4.5 Sarana Olahraga, Pendidikan & Peribadahan

Lapangan Olahraga	TK	SD	SMP	SMA	Masjid	Musallah
1	2	1	-	-	5	-

B. Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta yang peneliti peroleh di lapangan kemudian disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori Indikator Keberhasilan Kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:91).

Setelah data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan kemudian data yang terkumpul diolah dengan aktivitas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam metode pendekatan kualitatif kemudian data yang diperoleh peneliti selama ini dideskripsikan dalam bentuk kalimat naratif.

Langkah berikutnya, peneliti menyajikan data dengan memaparkan melalui kalimat naratif, tabel, ataupun gambar guna mendeskripsikan gambaran dari hasil penelitian. Tahap terakhir dalam penarikan kesimpulan, ketika peneliti selesai mendapatkan data jenuh yang berarti telah ada pengulangan informasi sehingga kesimpulan itulah yang peneliti gunakan sebagai jawaban masalah penelitian ini.

Penelitian mengenai Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa akan dibahas sesuai dengan teori Indikator Keberhasilan Kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:91) meliputi beberapa indikator yaitu: Indikator Input, Indikator Proses yang didalamnya melewati beberapa tahapan proses pengelolaan kedua pihak yakni Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Setelah itu ada indikator Output dan indikator outcome. Melalui keempat (4) indikator tersebut maka dapat dilihat peran dari masing-masing pihak dalam pengelolaan Kemitraan dalam hal meningkatkan kesejahteraan Perekonomian Masyarakat melalui objek pariwisata yang akan dikelola oleh pihak BUMDES dan POKDARWIS Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang kemudian dapat dilihat hasilnya.

1. Indikator Input

Indikator Input merupakan salah satu indikator dasar yang sangat penting dalam merumuskan model kemitraan yang akan dilakukan. Dalam indikator input merupakan indikator yang menekankan aspek dasar kemitraan meliputi: Dasar pelaksanaan kemitraan, Surat keputusan kemitraan, dan Anggaran Pengelolaan. Dalam penelitian mengenai Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goal (SDGs) indikator input yang pertama ditekankan pada adanya surat keputusan yang merupakan dasar pelaksanaan kemitraan dan mengatur segala kegiatan kemitraan antara kedua pihak. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“.....Dasar kemitraan dalam pengelolaan Kemitraan yaitu saling menguntungkan, saling membantu dengan tujuan agar bisa mensejahterahkan masyarakat. Jadi BUMDES dengan POKDARWIS bekerja sama untuk mengupayakan masyarakat sebagai jembatan dalam pengembangan Desa Biringala maupun dalam mengembangkan UMKM di Desa Biringala....” (hasil wawancara pada tanggal 15 April 2022)

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Biringala melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“.....Dasar yang menjadi alasan dilakukannya pengelolaan Kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS yaitu keberadaan BUMDes dan POKDARWIS merupakan elemen penting dalam penguatan perekonomian masyarakat Desa Biringala ini. Kami pemerintah Desa Biringala berharap dapat menjalin kerja sama yang baik bagi organisasi-organisasi Kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat....(hasil wawancara pada tanggal 15 April 2022)

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh ketua BUMDes Desa Biringala melalui wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

“...BUMDes dan POKDARWIS merupakan organisasi yang dapat menjasi peluang dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa Biringala melalui pengembangan Desa Wisata. POKDARWIS sendiri disini sebagai pihak pengelola pariwisata selayaknya bisa bermitra dengan BUMDes dalam membangun ekonomi Desa Biringala....(hasil wawancara pada tanggal 15 April 2022)

Dari hasil ketiga informan tersebut mengenai dasar yang menjadi alasan dilakukannya pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Biringala melalui pengembangan Desa Wisata. Pemerintah Desa berharap dengan adanya pengelolaan kemitraan Desa Biringala dapat mengembangkan Desa Wisatanya, kelompok masyarakat pengembangan dan pengelolaan pariwisata atau sering disebut POKDARWIS agar bisa menjadi mityra strategis bagi BUMDes dalam membangun ekonomi masyarakat.

Surat perjanjian yang mengatur terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Kemitraan melalui BUMDES dan POKDARWIS dalam mengatur proses kemitraan antara dua pihak. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“.....Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bakal menguatkan lagi legalitas Hukum BUMDes, adapun aturan mengenai pembentukan POKDARWIS yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966). Dinaungi oleh Kementrian Pariwisata yang sekarang ini mengebleng dengan adanya kegiatan Desa Wisata yang bertujuan untuk memajukan Desa utamanya dalam objek pariwisata. Jadi potensi yang ada di Desa tersebut kemudian dikembangkan...” (*hasil wawancara pada tanggal 16 April 2022*)

Dari hasil ketiga informan tersebut mengenai surat keputusan sebagai acuan pengelolaan Kemitraan melalui BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bakal menguatkan lagi legalitas Hukum BUMDes, dan mengenai POKDARWIS di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).

Selain itu, dalam dasar kemitraan pengelolaan tentunya membutuhkan anggaran sebagai salah satu faktor vital. Kemudian peneliti memperoleh informasi terkait alokasi anggaran dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Biringala.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“.....Sejauh ini BUMDes Desa Biringala telah mengupayakan untuk pembangunan beberapa usaha dalam menunjang perekonomian di Desa Biringala. Dalam pengelolaan anggaran dana desa penyertaan dana awal sebesar Rp. 45.000.000 dengan modal tersebut ada beberapa jenis usaha yang dibangun yaitu budidaya ikan nila, budidaya ikan lele dan café

kareba. Yang kemudian untuk 2 tahun terakhir alokasi dana desa untuk penanganan Covid-19 dan untuk bantuan langsung tunai (BLT) jadi untuk pemerintah Desa Biringala belum menambah modal untuk BUMDes. Terkait dengan Mou atau bukti kerja sama dengan pihak pengelola kami sendiri belum ada dikarenakan kami belum mendapatkan tambahan modal selama 2 tahun terakhir ini yang modalnya difokuskan kepada bantuan penanganan Covid-19. Jadi kami dari masing-masing pihak pengelola hanya bisa mengusahakan bagaimana desa wisata tersebut dapat tetap terjaga.....” (hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Sekretaris BUMDes Desa Biringala melalui wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

“....Dalam pengelolaan anggaran dana desa dana wal yang diberikan oleh pemerintah Desa sendiri yaitu Rp.45.000.000 modal tersebut kami dari pihak BUMDes melakukan beberapa jenis usaha yaitu Budidaya Ikan Lele, Budidaya Ikan Nila, serta Café Kareba. Dan sampai 2 tahun terakhir ini pemerintah belum menambah modal untuk pengembangan BUMDes...(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Sejalan dengan penuturan Bendahara BUMDes Desa Biringala mengenai Alokasi Anggaran Dana Desa sebagai berikut:

“....Kami sendiri dari BUMDes mendapatkan Anggaran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah sebesar Rp.45.00.00 dengan anggaran tersebut kami melakukan beberapa jenis usaha seperti Budidaya Ikan lele, Budidaya Ikan Nila serta Café Kareba. Dengan anggaran tersebut masih terbilang sedikit untuk mengembangkan beberapa jenis usaha yang ada di Desa Biringala ini. 2 tahun terakhir kami belum dapat penambahan modal dari pihak pemerintah, jadi otomatis dalam pengelolaan jenis usaha tentunya terkendala oleh karena itu kami dari pihak pengelola berinisiatif menggunakan modal pribadi dalam pengelolaan café kareba tersebut sebagai pengalihan fungsi sebagaimana yang dilakukan oleh pihak pengelola agar pengembangan yang dilakukan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil ketiga informan tersebut mengenai alokasi dana desa dalam pengelolaan kemitraan belum sesuai dengan prioritas. Dalam pengelolaan dan pengembangan Kemitraan Desa Biringala masih cukup minim bahkan dalam situasi pandemik Covid-19 tidak ada dana untuk pembangunan fisik.

2. Indikator Proses

Indikator proses dalam penerapan model kemitraan menjadi poin paling penting lantaran sebuah usaha pengelolaan dapat dilihat keberhasilannya melalui tahapan proses-proses yang dilakukan. Indikator proses kemitraan diartikan sebagai proses pelaksanaan yang dilakukan dan dapat dilihat dari beberapa aspek yakni: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Aspek proses pengelolaan kemitraan tersebut kemudian ditinjau dari peranan kedua pihak dalam mengelola suatu objek dalam hal ini BUMDES dan POKDARWIS.

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber. Dalam hal kemitraan mengelola Desa Wisata oleh BUMDES dan POKDARWIS perencanaan yang matang tidak hanya terlihat dari sinergisnya rencana pengelolaan dari kedua pihak. Namun juga diwujudkan dengan melihat peluang dan kondisi yang ada agar mampu menunjang dan bertahan. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Biringala yang menjelaskan bahwa:

“.....Untuk sinergitas para pengelola kemitraan dengan masyarakat itu ada, kami sebagai pengelola BUMDES maupun POKDARWIS. Sinergisnya tentunya bentuk Kerjasama antara masyarakat dengan para pengelola Kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh melalui Sekretaris BUMDes terkait dengan masing-masing organisasi memiliki tujuan yang sama dalam pelaksanaan Kemitraan yaitu:

“..... BUMDES dan POKDARWIS dua organisasi yang berbeda tetapi juga bisa bekerja sama antara dua organisasi tersebut. BUMDES bertujuan untuk memacu, tetapi untuk keanggotaan berbeda dengan POKDARWIS karna POKDARWIS disini bertujuan untuk mengelola bentuk kegiatan yang terdapat didalam BUMDES. Tetapi dalam usaha pengelolaan Desa Wisata dua organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mengembangkan Desa wisata Desa Biringgala *(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)*

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh melalui Ketua POKDARWIS terkait dengan tujuan masing-masing organisasi dalam Pelaksanakan Kemitraan yaitu:

“....Tujuan dari BUMDes sendiri disini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana, melakukan pelatihan ataupun pendampingan dalam pengelolaan Desa Wisata kepada POKDARWIS. POKDARWIS disini sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona dalam upaya mewujudkan pengembangan desa wisata. *(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)*

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan mengenai tujuan organisasi kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari masing-masing organisasi pada akhirnya tetap sama dan sinergis dan tujuan itulah yang akan menentukan rencana pengelolaan yang akan dibuat yakni mengembangkan Desa Wisata sehingga memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat. Melalui tujuan itulah kemudian berangkat menjadi sebuah pemikiran apa saja yang harus dilaksanakan, dampak yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kemitraan antara kedua pihak yang harus dapat disiasati sehingga model kemitraan yang selama ini diterapkan dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan kemudian peneliti melakukan wawancara Sekretaris BUMDes Desa Biringgala yang mengatakan bahwa:

“....Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan rencana pengelolaan kemitraan kami rasa dari BUMDES tentunya sumber daya manusianya dimana dari anggota BUMDES sendiri sudah cukup mendukung. Kalau untuk faktor penghambatnya mungkin ada pada anggaran alokasi dana desa untuk BUMDes dan POKDARWIS dalam 2 tahun terakhir belum ada anggaran dari pemerintah Desa Biringala.....(*hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022*).

Kemudian hasil wawancara yang diperoleh melalui Ketua POKDARWIS terkait dengan faktor pendukung dalam perencanaan pengelolaan Kemitraan Desa Biringala yaitu:

“....Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan rencana pengelolaan Kemitraan dari POKDARWIS, untuk faktor pendukung dari anggota POKDARWIS juga sudah mendukung. tetapi kendala yang dihadapi oleh POKDARWIS dalam mewujudkan Desa Wisata diantaranya terkait dengan sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang artinya Sebagian masyarakat belum dalam menghadapi perubahan yang terjadi dilingkungan mereka, Sebagian masyarakat belum mengerti perbedaan apa itu objek wisata dengan desa wisata. Hal tersebut dikarenakan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah dan pola pikir masyarakat di Desa terbilang masih tradisional.....(*hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022*).

Sejalan dengan hasil wawancara oleh Sekretaris POKDARWIS mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pengelolaan Kemitraan Desa Biringala sebagai berikut:

“....faktor pendukung dalam pengelolaan kemitraan juga di perlukan motivasi yang cukup tinggi dari pemerintah khususnya dalam mengembangkan Desa Wisata ini. Selain motivasi dari pemerintah, motivasi dari mayarakat juga berperan dalam pengembangan potensi yang ada di Desa Biringala. Faktor penghambat dalam pengelolaan kemitraan ini yaitu di perlukan penyediaan anggaran yang cukup besar dalam pengembangan Desa Wisata Biringala.

Dari hasil wawancara ketiga informan mengenai faktor yang ditimbulkan dari masing-masing organisasi dalam pengelolaan Kemitraan yaitu untuk faktor pendukung dari masing-masing organisasi dimana anggota BUMDes dan

POKDARWIS sudah cukup memadai. Selain itu, terdapat faktor penghambat dari masing-masing organisasi dalam pengelolaan Kemitraan yaitu di perlukan motivasi dari pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata serta masalah anggaran alokasi dana desa yang belum merata akibat adanya Covid-19 yang dalam 2 tahun terakhir pemerintah Desa belum menambah Modal dalam pengelolaan Desa Wisata serta dalam mewujudkan Desa Wisata sulit merubah pola pikir masyarakat yang artinya Sebagian masyarakat belum siap fisik dan mental dalam menghadapi perubahan yang terjadi dilingkungan. Sebagian masyarakat belum mengerti antara objek wisata dan desa wisata dikarenakan masih rendahnya pola pikir masyarakat yang cenderung masih tradisional.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan salah satu peran pendukung terlaksananya proses pengelolaan kemitraan. Dalam penelitian model kemitraan pengelolaan, pengorganisasian dilakukan guna membagi peran para pihak dalam melaksanakan tugasnya masing- masing.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai pembagaaian tugas dan koordinasi dengan Ketua BUMDes yang menjelaskan bahwa:

“...Untuk pembagian kerja dalam organisasi BUMDes ini sendiri mulai dari ketua, sekretaris, bendahara serta tiga pengelola unit. Untuk tiga unit pengelolaan BUMDes ini yang pertama Unit Budidaya Ikan Lele, Unit Budidaya Ikan Nila dan yang ketiga unit pengelolaan sampah.(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Sejalan dengan yang diungkapkan ketua BUMDes, hal yang senada juga yang diungkapkan oleh Sekretaris POKDARWIS mengenai pembagian kerja dari pihak POKDARWIS Desa Biringala yang menyatakan bahwa:

“....Untuk pembagian kerja POKDARWIS disini masih dalam proses, masih pengeblengan untuk anggota POKDARWIS apa itu sadar wisata, apa itu sapta pesona. Jadi untuk saat ini masih belum baik, karna POKDARWIS di sini merupaka organisasi yang masih baru dalam hal desa wisata. Desa wisata itu lebih berkontribusi bagaimana kegiatan masyarakat, kearifan local, serta bagaimana tatanan-tatanan budaya yang dibangkitkan kembali.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Sejalan dengan yang diungkapkan Sekretaris POKDARWIS mengenai pembagian kerja dan koordinasi dari pihak mengelola kemitraan, selaku Pengelola Unit Usaha yang mengatakan bahwa:

“..... Pembagian tugas disini semuanya sudah jelas, ada yang memberikan makan untuk ikan nila dan ikan lele setiap paginya, memperhatikan kebersihan kolam ikan, dan mengganti air kolam dua kali dalam seminggu. Menjaga keamanan disini ada dua shif yang bekerja selama 12 jam. serta ada yang menjaga kebersihan di sekitar lingkungan. Jadi selama ini pembagian tugas sudah terkoordinir dengan baik untuk penyerahan laporan akhir bulan.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Berdasarkan wawancara ketiga informan mengenai pembagian kerja atau koordinasi dari masing masing pihak pengelola kemitraan dapat ketahui bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan kemitraan Desa Biringala dipimpin oleh masing- masih ketua organisasi dan kemudian terbagi kembali dalam beberapa unit pengelolaan dan kemudian terkoordinir dengan baik.

3. Actuating (Pelaksanaan)

Dalam proses manajemen atau pengelolaan kemitraan di Desa Biringala pelaksanaan peran menjadi poin yang paling penting. Pelaksanaan sangat harus diperhatikan lantaran melalui pelaksanaan itulah kita dapat melihat sejauh mana terlaksananya rencana pengelolaan yang sudah disusun oleh masing-masing organisasi. Kemudian peneliti melakukan wawancara untuk melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan masing-masing pihak dalam pengelolaan Kemitraan

Desa Biringala. Pelaksanaan yang peneliti lihat paling awal terkait kepemimpinan, karena seorang pemimpin mempunyai pengaruh sangat besar dalam mempengaruhi petugas masing-masing bagian kerja lainnya. Hal ini kemudian diungkapkan oleh Ketua BUMDes Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“.....Arahan biasanya langsung dilakukan sesuai dengan tugas para masing-masing pengelola kemitraan. Karna pembagian tugas sudah jelas dari awal perekrutan anggota dari masing-masing pengelola kemitraan. Ketua BUMDes juga sangat mendukung serta memberikan supportnya kepada para pengelola Kemitraan Desa Biringala, anggota.....(*hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022*)

Sejalan yang dijelaskan oleh Sekretaris BUMDes mengenai arahan pemimpin sebagai berikut:

“....Masing-masing ketua organisasi memberikan arahan langsung yang sesuai dengan topoksinya, dan pembagian tugas sudah jelas dari awal sehingga untuk pelaksanaan tugas sudah di pahami. Dan terkhusus bagi petugas keamanan di berikan arahan setiap paginya.....(*hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022*)

Dapat kita ketahui bahwa dalam Pengelolaan Kemitraan dari segi kepemimpinan pada masing-masing organisasi sudah dilakukan sejak pembagian tupoksi awal perekrutan anggota BUMDes dan POKDARWIS sehingga pengelolaan langsung dapat berjalan. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris POKDARWIS Desa Biringala yang menyatakan bahwa:

“.....Setiap bulanya BUMDes dan POKDARWIS melaksanakan pemantauan dilapangan seperti apa dan bagaimana. Dan juga pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap bulanya bagi pera mengelola kemitraan. Untuk monitoring dilakukan setahun tiga kali, kemudian juga nanti dilakukan pengawasan dan diakhir kita lakukan evaluasi untuk mengetahui apakah selama dalam pengelolaan kemitraan sudah optimal.....(*hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022*)

Selain dari segi kepemimpinan, pelaksanaan lainnya dapat dilihat dari apa saja yang dilakukan oleh kedua pihak dilapangan. Ini merupakan yang paling penting dalam pelaksanaan kemitraan. Dalam poin pelaksanaan, selain kepemimpinan, sikap dan moril sebagai pertanggungjawaban kewajiban melaksanakan tugas masing-masing pihak juga tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan melalui kemitraan yang harus diperhatikan pula yaitu bagaimana tata hubungan antar kedua pihak. Dimana dalam pelaksanaan kemitraan yang melibatkan lebih dari satu (1) organisasi harus memiliki komunikasi yang harmonis dan efektif. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKDARWIS yang menjelaskan bahwa:

“.....untuk tata hubungan dengan pengelola saat ini, setiap bulan kita adakan pertemuan dimana POKDARWIS disini sebagai pengelola melaporkan setiap bulanya berapa pemasukan, pengeluaran atau laporan pertanggungjawaban setiap bulanya. Dan setiap dua minggu kita adakan rapat antara BUMDes dan POKDARWIS membahas tentang kemajuan daripada kemitraan tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan, bagaimana cara agar kemitraan ini bisa berkembang.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Sejalan yang dijelaskan oleh Sekretaris BUMDes mengenai Tata hubungan dari masing-masing organisasi sebagai berikut:

“...Kalau untuk Tata Hubungan antara Pengelola Kemitraan sudah cukup baik, sekarang lebih gampang lagi komunikasinya karna sudah melalui sosial media jika ada yang ingin di komunikasikan bisa langsung Via Grup WhatsApp.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Dari pelaksanaan yang ada dilapangan kemudian peneliti melakukan wawancara terkait upaya mengajak masyarakat ikut serta dalam Pengelolaan Kemitraan Desa Biringala. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris BUMDes Desa Biringala yang mengatakan bahwa:

“.....tujuan BUMDes dan POKDARWIS didirikan adalah sebagai awal untuk menarik minat masyarakat Desa Biringala untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata. Jadi POKDARWIS disini bertugas untuk menarik Masyarakat bagaimana mereka mencintai Desanya, bagaimana mereka ikut berpartisipasi, bekerja sama, membantu dalam mengembangkan Desa Wisata Biringala yang kita bangun ini.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Berdasarkan wawancara ketiga informan mengenai Tata Hubungan Pengelolaan Kemitraan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan kemitraan di butuhkan hubungan kerja yang baik dari kedua pihak. Hubungan didalam organisasi merupakan tata hubungan kerja dimana setiap pihak yang bekerja didalamnya dapat mengetahui tugas dan wewenang yang sudah diberikan, bukan hanya hubungan dalam hal pekerjaan tapi juga sangat diperlukan hubungan komunikasi yang baik diantara masing-masing pengelola kemitraan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Sebelum melakukan evaluasi atau penilaian tentunya harus melewati tahap monitoring dan pengawasan. Pengawasan tentunya dibagi kepada kedua pihak. Mengenai hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes yang mengatakan bahwa:

“.....Di sini BUMDes Setiap bulanya BUMDes dan POKDARWIS melaksanakan pemantauan dilapangan. Dan juga pengawasan, monitoring dan evaluasi setiap bulanya bagi pera mengelola kemitraan. Untuk monitoring dilakukan setahun tiga kali, kemudian juga nanti dilakukan

pengawasan dan diakhir kita lakukan evaluasi untuk mengetahui apakah selama dalam pengelolaan kemitraan sudah optimal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya BUMDes dan POKDARWIS setiap bulanya terdapat laporan pertanggungjawaban kita evaluasi apa keperluan, pemasukan tentang pengelolaan selama sebulan tersebut. Sedangkan POKDARWIS disini sebagai pengelola dikoordinasi oleh BUMDes dan evaluasinya juga dilakukan setiap bulan.... *(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)*

Sejalan dengan penuturan dari Ketua BUMDes terkait dengan pengawasan, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris BUMDes pihak terkait dengan pengawasan sebagai berikut:

“...antara BUMDes dan POKDARWIS ada laporan pertanggungjawaban kita evaluasi terkait keperluan dalam pengelolaan selama ini yang dilakukan. Di sini POKDARWIS sebagai pihak pengelola di koordinasi oleh BUMDes yang melakukan evaluasi setiap bulan, dan BUMDes disini juga berperan kesehariannya dalam proses pengelolaan Café Kareba. *(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Unit pengelola keamanan terkait dengan pengawasan sebagai berikut:

“...Kami dari pihak keamanan sendiri bekerja selama 12 jam dengan 2 shift yang menjaga keamana di sekitar lingkungan Desa Wisata, memastikan bahwa semua wilayah aman. *(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)*

Dari keriga informan tersebut mengenai bentuk pengawasan Pengelolaan Kemitraan bahwa BUMDes dan POKDARWIS sebagai pengelola tidak hanya melakukan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata tetapi juga melakukan pengawasan dilokasi untuk menjaga lingkungan sekitar agar tetap aman.

3. Indikator Output

Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari hasil program atau kegiatan yang dikerjakan oleh organisasi terkait dengan kesepakatan peran masing-masing organisasi tersebut. Setelah melihat bagaimana Indikator input,

indikator proses meliputi: *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Kemudian peneliti melakukan penggalian informasi bagaimana indikator output yang saat ini sudah diperoleh selama penerapan kemitraan. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Biringala yang menyatakan bahwa:

“.....Dari masing-masing organisasi sudah bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diberikan seperti POKDARWIS disini bertugas sebagai pengelola Desa Wisata dan BUMDes disini nantinya melakukan evaluasi Kembali mengenai beberapa hal yang perlu kita tingkatkan didalam pengelolaan Desa Wisata(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Indikator output sebagai penentu keberhasilan kemitraan terkait peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris BUMDes Desa Biringala yang menyatakan bahwa:

“.....Peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya pastinya ada. Untuk kas BUMDes tentunya ada peningkatan, dan masyarakat disini kita ajak untuk berpartisipasi seperti kita mengajak para pelaku UMKM untuk menjual produk UMKMnya, dan kedepanya kita terus kembangkan.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Kemudian, dari pelaksanaan pengelolaan kemitraan hal yang harus dilaksanakan yaitu terkait dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKDARWIS Desa Biringala yang menyatakan bahwa:

“..... Bagi pengelolaan Kemitraan ini sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat karna disini masyarakat diikutsertakan dalam pengelolaan kemitraan itu sendiri. Dan bagi para pelaku UMKM nanti akan dikembangkan kedepanya. Tentunya kami para anggota pengelola Kemitraan mengharapka support dari pemerintah terutama berupa anggaran atau penyertaan modal lebih besar lagi serta dukungan dari masyarakat tentunya.....(hasil wawancara pada tanggal 16 april 2022)

Dari ketiga informan tersebut mengenai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan kemitraan dari masing-masing organisasi sudah

melakukan pengelolaan dengan baik serta setiap tahunnya terdapat peningkatan pendapatan setiap tahunnya yang kemudian dimasukkan kedalam pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi kas Desa. Dalam pengelolaan kemitraan masyarakat ikut serta dalam pengelolaan kemitraan tentunya melakukan pengembangan bagi produk usaha UMKM agar kedepannya dapat dikembangkan.

4. Indikator Outcome

Tolok ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya permasalahan yang terjadi ataupun dampak yang diberikan selama pengelolaan kemitraan. Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua POKDARWIS Desa Biringala yang menyatakan bahwa:

“...Dalam pengelolaan Kemitraan di Desa Biringala sudah bekerja sama dengan baik. BUMDes dan POKDARWIS adalah bentuk kerja sama dimana yang mengadakan sarana dan prasarana adalah BUMDes dan yang mengelola adalah POKDARWIS.....*(hasil wawancara pada tanggal 16 April 2022)*

Terkait dengan Sumber Daya Manusia yang ada dalam pengelolaan kemitraan sejalan yang dijelaskan oleh Sekretaris BUMDes sebagai berikut:

“...Untuk Sumber Daya Manusia sendiri secara kuantitas sudah terpenuhi, tetapi secara kualitas masih diperlukan pengembangan melalui pelatihan-pelatihan lagi mengenai pengelolaan kemitraan.....*(hasil wawancara pada tanggal 16 April 2022)*

Mengenai identifikasi masalah Jumlah SDM di masing-masing organisasi bahwasanya secara jumlah sudah terpenuhi, namun secara kualitas belum memenuhi dan masih dibutuhkan pelatihan terkhusus dalam pengembangan skill dalam pengelolaan kemitraan.

Sejalan dengan penuturan Ketua BUMDes mengenai keberhasilan kemitraan sebagai berikut:

“....Secara keseluruhan kami dari masing-masing pihak pengelola semua target kerja sudah berjalan dengan baik. Kami harapkan bahwa setiap anggota organisasi agar bisa mempertahankan dan menjaga kestabilan kerja, rutin melakukan pertemuan keanggotaan serta lebih mengoptimalkan pengelolaan kemitraan Desa Biringala.....(hasil wawancara pada tanggal 16 April 2022)

Dari ketiga informan tersebut mengenai aspek keberhasilan pengelolaan kemitraan sudah berjalan dengan baik hanya saja diperlukan penguatan dibidang kualitas Sumber Daya Manusia dari masing-masing organiasi guna menunjang pelaksanaan kinerja dan pencapaian target lebih baik lagi dan mewujudkan Desa Wisata yang lebih baik lagi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti temui di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari beberapa ilmuwan mengenai indikator keberhasilan kemitraan. Pengelolaan kemitraan merupakan salah-satu potensi yang dimiliki desa biringala dalam meningkatkan perkonomian masyarakat. Pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Biringala dan dijadikan sebagai Desa Wisata didaerah tersebut.

Dalam pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS dikembangkan yang bertujuan agar masyarakat melihat bahwa di Desa tersebut memerlukan pengembangan dari beberapa lokasi-lokasi untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menikmati sekaligus

mencintai lingkungan yang dan mencari lokasi pengembangan Desa Wisata untuk dijadikan sebagai sarana pengelolaan Kemitraan. Tentu hal ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Indikator Keberhasilan Kemitraan menurut Ditjen PM dan P2L dalam Kuswidanti yaitu :

1. Indikator Input,
2. Indikator Proses: menggunakan proses pengelolaan menurut G.R Terry: *planning, organizing, actuating, controlling.*
3. Indikator Output
4. Indikator Outcame.

1. Indikator Input

Indikator Input merupakan indikator yang memuat dasar pelaksanaan kemitraan. Dalam penelitian ini indikator input menekankan kepada adanya tim atau sekertariat yang ditandai dengan kesepakatan bersama, adanya sumber dana pengelolaan, dan adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati institusi terkait.

Dasar pelaksanaan pengelolaan kemitraan Bersama BUMDes dan POKDARWIS di Desa Biringgala adalah keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Biringgala baik secara anggaran maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu pemerintah Desa Biringgala akan terus bersinergi dalam meningkatkan pengelolaan Kemitraan tersebut.

Terkait surat keputusan yang menjadi acuan bagaimana kemitraan tersebut berjalan berdasarkan surat keputusan Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bakal menguatkan lagi legalitas Hukum BUMDes, adapun aturan mengenai pembentukan POKDARWIS yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) yang dinaungi oleh Kementerian Dinas Pariwisata yang membahas tentang Desa Wisata.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang ada di Desa Biringala masih cukup minim untuk meningkatkan pengelolaan Kemitraan terutapa pada pembangunan fisik hal ini terjadi di tahun 2019-2011 selama masa pandemic. Sumber daya pendapatan Desa Biringala untuk tahun anggaran 2021 rinciannya yaitu Rp. 45.000.000 yang kemudian berupaya untuk membangun usaha untuk menunjang perekonomian di Desa Biringgala dengan jenis usaha Budidaya ikan nila, budidaya ikan lele dan café kareba. Dengan melihat substansi yang ada dalam indikator input, maka secara keseluruhan indikator input dalam Pengelolaan Kemitraan Bersama dengan BUMDes dan POKDARWIS masih belum efektif.

2. Indikator Proses

Dalam penelitian mengenai pengelolaan Kemitraan di Desa Biringgala Bersama dengan BUMDes dan POKDARWIS meliputi pembangunan dan pengelolaan Desa Wisata, Pengoprasian Objek Desa Wisata dan pemasukan bagi masing-masing pihak pengelola dalam hal ini yakni pihak pengelolaa

Desa wisata dan bagi pihak pemerintah Desa Biringala. Dalam indikator proses ditekankan kepada sistem pengelolaan menurut G.R Terry yakni meliputi: *planning, organizing, actuating, controlling*.

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Rudy Kipling dalam Athoillah (2010:106), langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan
- 2) Menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang
- 3) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
- 4) Mengembangkan rencana dan menjabarkannya.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun dari masing-masing pihak sudah menentukan sasaran dari perencanaan yang dibuat dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat kemudian dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Dari masing-masing pihak pengelola pun sudah bekerja sama dengan baik dalam hal ini pihak BUMDes dan POKDARWIS. Namun dari keseluruhan rencana pengelolaan yang sudah ada masih terdapat kendala pada penganggaran alokasi Daerah yang terbilang cukup minim dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Biringala.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Ciri organisasi menurut Manullang terbagi menjadi (3) tiga yaitu:

1. Sekelompok orang,
2. kerjasama atau pembagian pekerjaan
3. tujuan bersama.

Pengorganisasian dalam Pengelolaan Kemitraan Melalui BUMDes dan POKDARWIS dapat dilihat dari pembagian kerja sesuai dengan kewenangan yakni pengelolaan di lapangan. Dapat ketahui bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan Kemitraan di sini BUMDes sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Desa Wisata dan dari pihak POKDARWIS sebagai pengelola Desa Wisata. Masing masing pihak organisasi tersebut melakukan monitoring ataupun pembinaan terhadap masing-masing anggota organisasi apabila terdapat kendala dalam pengelolaan Desa Wisata.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan paling awal dari segi kepemimpinan, pihak BUMDes memiliki peran sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana dalam

pengelolaan desa wisata. Masing-masing pihak organisasi berperan untuk memberikan arahan kepada setiap anggota organisasinya, membentuk rencana pengelolaan, melaksanakan rapat dan membahas pekerjaan yang akan dilakukan seperti pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir bulan. Rapat tersebut dibuat bertujuan untuk memahami masing-masing anggota organisasi kapan target pengelolaan harus selesai sehingga semuanya berjalan efektif.

Setelah melihat bagaimana arahan pemimpin maka masing-masing anggota organisasi melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Semua tugas yang diberikan tentunya tetap mengkomunikasikan dengan pimpinannya untuk kemudian masing-masing pimpinan mengkomunikasikan agar tetap menjaga tata hubungan selama berlangsungnya kemitraan supaya tujuan pengelolaan tercapai dengan optimal.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dalam pengelolaan Kemitraan di Desa Biringala dilakukan oleh kedua belah pihak yakni BUMDes dan POKDARWIS. Masing-masing anggota kelompok melakukan pemeliharaan Desa Wisata seperti menjaga kebersihan lingkungan, memberi makan ikan setiap paginya dan melakukan penjagaan keamanan yang bekerja terbagi menjadi dua (2) shift untuk bekerja 12 jam.

Selain melakukan pengawasan masing-masing pihak organisasi melakukan monitoring atau pembinaan terhadap laporan kegiatan dan

laporan keuangan Serta memonitoring terkait pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengamanan, dan menjaga kebersihan lingkungan.

3. Indikator Output

Dalam melihat sejauh mana keberhasilan kemitraan menurut teori indikator keberhasilan kemitraan salah satunya dilihat dari indikator output. Indikator output dalam penelitian mengenai Pengelolaan Kemitraan yang dilaksanakan oleh BUMDes dan POKDARWIS tujuannya untuk mengetahui hasil dari program yang dilaksanakan selama pengelolaan Desa Wisata. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi dimana dalam hal evaluasi tersebut terdapat hambatan-hambatan yang masih terjadi didalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Biringala.

Dari masing-masing anggota organisasi sudah bekerja sama dalam peningkatan Desa Wisata. Mengikutsertakan masyarakat serta pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk UMKMnya agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Biringala.

Demi menurunkan permasalahan yang ada diharapkan dari masing-masing pihak organisasi perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan dan pembanguna Desa Wisata serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembanguna Desa Wisata.

4. Indikator Outcome

Indikator outcome merupakan indikator paling akhir dari teori indikator keberhasilan kemitraan. Tujuan dari indikator outcome adalah

melihat penurunan dari masalah yang terjadi sebagai bukti bahwasanya model kemitraan yang selama ini diterapkan sudah berhasil.

Melihat penurunan jumlah permasalahan yang terjadi maka dapat kita ketahui bersama bahwa pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS sudah efektif upaya-upaya peningkatan Desa Wisata terus selalu dilakukan oleh kedua pihak Organisasi agar kedepannya bisa berjalan lebih maksimal.

Dari penjelasan indikator diatas berkaitan dengan kemitraan BUMDes dan POKDARWIS dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau pembangunan berkelanjutan di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Pada Indikator *Input*, secara Anggaran maupun Sumber Daya Manusia masih terbilang minim. Pada Tahun 2019-2021 menghasilkan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000 terdapat Beberapa jenis usaha yang dijalankan yaitu Budidaya ikan lele, Budidaya ikan nila dan Café Kareba. Dalam pengelolaan jenis usaha tersebut masih terbilang cukup minim untuk meningkatkan pembangunan terutama pada untuk pembangunan fisik hal ini terjadi ditahun 2019-2022 selama masa pandemik. Semua Sumber Daya akan menunjang tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Desa Biringala.

Kemudian bila dilihat dari segi Indikator *Proses*, kemitraan BUMDes dan POKDARWIS secara tidak langsung melakukan tanggung jawab masing-masing pihak organisasi sudah menentukan sasaran dari perencanaan yang akan dibuat. Dengan melihat faktor pendukung dan penghambat dalam

menjalankan kemitraan Bersama BUMDes dan POKDARWIS. Masing-masing pihak tersebut sudah bekerja sama dengan baik. Akan tetapi, dalam keseluruhan perencanaan masih terdapat kendala pada penganggaran alokasi Daerah yang terbilang cukup minim dalam pengelolaan Desa Wisata di Desa Biringala.

Selain itu dalam Indikator *Proses* terdapat Pengorganisasian dalam Pengelolaan Kemitraan Melalui BUMDes dan POKDARWIS yakni pengelolaan di lapangan. Dapat ketahu bahwa pengorganisasian dalam pengelolaan Kemitraan di sini BUMDes sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Desa Wisata dan dari pihak POKDARWIS sebagai pengelola Desa Wisata. Masing-masing pihak organisasi tersebut melakukan monitoring ataupun pembinaan terhadap masing-masing anggota organisasi apabila terdapat kendala dalam pengelolaan Desa Wisata.

Kemudian pada Indikator *Proses*, masing-masing pihak organisasi membentuk rencana pengelolaan, melakukan pembinaan, monitoring maupun evaluasi terhadap masing-masing anggota organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami masing-masing anggota organisasi kapan target pengelolaan harus selesai sehingga semuanya berjalan efektif. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rangka Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Desa Biringala.

Kemudian pada Indikator *Output*, masing-masing anggota organisasi sudah bekerja sama dalam peningkatan Desa Wisata. menjalin kerja sama dengan UMKM dalam rangka membangun perekonomian usaha kecil

masyarakat Desa Biringala yang merupakan bentuk program yang dijalankan oleh BUMDes memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian para pelaku usaha kecil. Bila dilihat dalam target Sustainable Development Goals (SDGs), sasaran program ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Biringala serta meningkatkan kerjasama dengan para pelaku UMKM. Program ini juga dapat menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tujuan Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Desa Biringala.

Selain itu terdapat Indikator *Outcome* pada kemitraan BUMDes dan POKDARWIS. Tujuan dari Indikator *Outcome* adalah melihat penurunan dari masalah yang terjadi sebagai bukti bahwasanya model kemitraan yang selama ini diterapkan sudah berhasil. Pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS sudah efektif upaya-upaya peningkatan Desa Wisata terus selalu dilakukan oleh kedua pihak Organisasi agar kedepannya bisa berjalan lebih maksimal. Masing-masing pihak organisasi turut serta dalam mengembangkan Kemitraan dalam meningkatkan perekonomian serta pengembangan Desa Wisata dalam rangka Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Lebih jauh terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, selanjutnya masing-masing pihak organisasi menjadi agen perubahan yang turut membantu pihak Pemerintah dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Tahun 2030 kelak, karena dalam implementasinya masing-masing pihak organisasi sudah menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya dapat dikembangkan dan semakin ditingkatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Kemitraan dalam Mwujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa yang di ukur melalui teori Indikator Keberhasilan Kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:91) dapat dikatakan berhasil.

Pengelolaan kemitraan melalui BUMDes dan POKDARWIS sudah berjalan baik dilihat dari indikator keberhasilan kemitraan yang ada, selain itu pembangunan sejak awal pengelolaan kemitraan juga terjadi peningkatan. Melalui pengelolaan kemitraan ini juga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahunnya. Segi yang belum optimal yaitu masalah anggaran alokasi dana desa yang masih minim sehingga pembanguna Desa Wisata belum Merata.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan maka peneliti mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Goga terkait Analisis Kemitraan dalam Mwujudkan Sustainable Development Goals (SDGs):

1. Bagi pemerintah Desa Biringala sebaiknya meningkatkan

sosialisasi terkait pengelolaan kemitraan kepada masyarakat setempat.

2. Bagi pemerintah Desa Biringala kami dari pengelola kemitraan terkhusus untuk BUMDes dan POKDARWIS perlu adanya support dari pemerintah berupa Anggaran Alokasi Dana Desa agar Desa Wisata dapat dikembangkan.
3. Bagi pihak masing-masing organisasi agar melakukan kegiatan-kegiatan atau arahan-arahan bagi masing-masing anggota organisasi untuk dapat meningkatkan pengelolaan kemitraan terkhusus untuk pengembangan Desa Wisata di Desa Biringala.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Makassar: Graha Ilmu.
- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- BAPPENAS. 2007. *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan.
- Borrini-Feyerabend, G. 1996. Collaboration Management of Protected Area: Tailoring the Approach to the Context. Social Policy Group IUCN. <http://www.iucn.org/> (download 12-1-2011)
- Ditjen P2M & PL. 2004. *Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi*. Jakarta: Depkes
- Eisler, R & Montuori, A. 2001. The Partnership Organization: A System Approach. O.D. Practitioner, Vol. 33, No. 2. <http://www.bepress.com?article> (download 10-2-2011)
- Fauzanto, A. (2020). *Problematika Korupsi dalam Desa pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi*. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 43-52.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hodgett, S., and Johnson, D. 2001. Troubles, Partnerships and Possibilities: A Study of the Making Belfast Work Development Initiative in Northern Ireland. *Journal Public Administration & Development*: Oct 2001; 21, 4; ABI/INFORM Research. Pg 321-332
- Isnaningtyas, Y., & Marlina, N. (2017). *Analisis kemitraan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 551-560.
- Kariem. 2003. *Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Marzuki. 2019. *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Lindung Di Desa Pujananting Kecamatan Pujananting*. Barru: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mas'ud, Wirda Al. 2019. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pengembangan Biogas Rumah Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- Prasiasa, D. P. O., & Widari, D. A. D. S. (2019). *Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan, Kemitraan, dan Penguatan Kelembagaan Di Desa Terunyan, Bali*. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 13(1), 55–71. <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i1.13923>
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Salsabila, Z. A. (2020). *Implementasi Program SDGs (Sustainable Development Goals) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Surakarta*.
- Setianingsih, N. S. (2019). *Kemitraan antara Desa Dalangan dengan Desa Jimus dan Desa Ngaran dalam Program Pansimas*.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Subanar, Harimurti. 1997. *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.
- Tugimi, 2004. *Kewarganegaraan*. Surakarta: Cv. Grahadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bakal menguatkan lagi legalitas Hukum BUMDes.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).
- Wardoyo, B. (2020). *Penerapan Sustainable Development Dalam Pembangunan Ketenagakerjaan di Indonesia*. *Jurnal Bina Ketenagakerjaan*, 1(1), 18–34. <http://jurnalbinaker.pusdiklat.kemnaker.go.id/index.php/binaker/article/view/15>
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Yuanita, T. R. (2017). *Kemitraan Stakeholder dalam Pengembangan Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi*.

R. Terry, George. 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hamdan, Mansoer. 1989. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wawan, Suherman. (2011). *Modul Kuliah Manajemen Olahraga Pengantar Organisasi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Keolahragaan UNY.





Lampiran 1. Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Anwar	Kepala Desa
2.	Nurhidayat	Sekretaris Desa
3.	Abd. Rais	Ketua BUMDes
4.	Munadiah Agmarinha S.E	Sekretaris BUMDes
5.	Ikhlasul Amal	Bendahara BUMDes
6.	M. Syamsul Bahri S.Pd, M.Pd	Ketua POKDARWIS
7.	Andi Sofyandi, S.Pd	Sekretaris POKDARWIS
8	Mansur Dg Nai	Pengelola Unit Usaha
9.	Jamaluddin Dg Majja'	Penjaga Keamanan



Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris BUMDes Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua POKDARWIS Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Ketua POKDARWIS Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris POKDARWIS Desa Biringala



Dokumentasi Wawancara dengan Pengelola Unit Kolam



Dokumentasi Wawancara dengan Penjaga Keamanan



Dokumentasi Usaha Cafe yang dikelola oleh BUMDEs bersama POKDARWIS

Desa Biringala



Dokumentasi Usaha Kolam Ikan Lele dan Ikan Nila yang dikelola oleh BUMDes bersama POKDARWIS Desa Biringala



Lampiran 3. SK Pembimbing

 <p>Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small></p>	<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fisip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id</p>
---	---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
Nomor : 0342/FSP/A.5-VI/III/1443/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Citra Ramadhani
 Stambuk : 105611115718
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) di Desa Biringgala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa"

Pembimbing I : Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
 Pembimbing II : Dr. Abdi, M.Pd

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
 Pada tanggal : 08 Maret 2022


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
 NBM: 730.727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip


 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia | Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
 Progress for the Nation and Humankind | Public Administration - Government Studies - Communication Science

Lampiran 4. Pengantar Penelitian

 <p>Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small></p>	<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fisisip@unismuh.ac.id Official Wcb : https://fisisip.unismuh.ac.id</small></p>
---	--

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0663/FSP/A.1-VIII/IV/1443 H/2022 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Citra Ramadhani
Stambuk : 10561 11157 18
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”
Judul Skripsi : *“Analisis Kemitraan dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu, Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 22 April 2022

Dekan,


Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos., M.Si
 NBM : 790 727


 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia
 Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi
 Public Administration - Government Studies - Communication Science

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

REGISTRASI/990/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 9 Mei 2022

Kepada Yth.

Kepala Desa Biringala, Kecamatan Barombong
Kabupaten GowaNomor : 503/371/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2022
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Penelitiandi-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 252/S.01/PTSP/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : CITRA RAMADHANI
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba / 9 Desember 2000
Nomor Pokok : 105611115718
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Br.Paoe, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Rt/Rw 001/001

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"ANALISIS KEMITRAAN DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI DESA BIRINGALA KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA"**

Selama : 27 April 2022 s/d 27 Juni 2022
Pengikut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian/Pengambilan Data** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peninggal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAROMBONG
DESA BIRINGALA**

Biringala, 20 Juni 2022

Nomor: 66 /DBA/VI/ 2022

Kepada

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Unismuh
Makassar

Hal : Telah Melakukan Penelitian

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Bupati Gowa terkait Izin melakukan penelitian di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kab. Gowa, maka kami dari Pihak Pemerintah Desa Biringala sangat mendukung kegiatan tersebut dan Mahasiswa Atas Nama **CITRA RAMADHANI** telah melakukan penelitian selama 2 bulan dengan judul “**Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa**”

Demikian Surat keterangan telah melakukan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PERMINTAAN KEMERDEKAAN
Sekdes
Desa Biringala
NURULDAVAT
NIP.196902132009061001

Lampiran 7. Surat Keputusan POKDARWIS**STRUKTUR ORGANISASI
BUMDES HARAPAN JAYA DESA BIRINGALA
KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA**

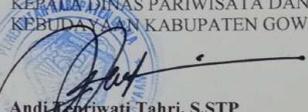
- 
1. Penasehat : Muhammad Anwar
 2. Pengawas : Syahriful Khaerul Hidayat
 3. Ketua BUMDes : Abd. Rais
 4. Sekretaris BUMDes : Munadiyah Agmarina S.E
 5. Bendahara BUMDes : Ikhlasul Amal
 6. Pengelola unit usaha pengelola sampah : Hasniah Dg. Tonji
 7. Pengelola unit usaha Budidaya ikan lele : Mansur Dg. Nai
 8. Pengelola unit usaha ikan nila : Jamaliddin Dg. Majja
 9. Pengelola unit café kareba : Abd. Rahman
 10. Pengelola Desa Wisata : POKDARWIS

LAMPIRAN : SK KEPALA DINAS KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN GOWA
Nomor : 556 / 60. b / DISPARBUD
Tanggal : 02 Juni 2021
Tentang : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Biringala Kecamatan
Barombong

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SADAR WISATA
(POKDARWIS) DESA BIRINGALA KECAMATAN
BAROMBONG KABUPATEN GOWA

1. Pembina :
 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa
 2. Camat Barombong
 3. Kepala Desa Biringala
 4. BPD Desa Biringala
2. Penasehat :
 1. Syahuddin Rahman, SH-Dg. Pasaung
 2. DR. Muh. Hasrul, SH, MH
3. Ketua : Abd. Rahman Dg. Sikki
4. Wakil Ketua : Syamsul Bahri, S.pd, M.Pd. S
5. Sekretaris : Andi Sofyandi, S.Pd
6. Bendahara : Hasma, S.Ag. Dg. Tonji
7. Seksi Daya Tarik dan Kenangan :
 - Bakri Majid Dg. Mattawang
 - Muh. Syarif Al Qadri
 - Wahyu Kurniawan
 - Muh. Aswan Ashari
8. Seksi Pengembangan Usaha :
 - Abd. Rais Dg. Narang
 - Muh. Ikhsan Rauf, S.Sos
 - Abd. Gaffar, SH Dg. Bonto
 - Muh. Rahmat
9. Seksi Humas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Sulfitri Sultan
 - Munadiyah Atmarina
 - Safri Syam
 - Yusril
10. Seksi Kemanan dan Ketertiban :
 - Jamaluddin Dg. Majja'
 - Jumaris Dg. Ngeppe'
 - Bahtiar Dg. Soma
 - Halim Perdanakusuma
11. Seksi Keindahan dan Kebersihan :
 - Hesni Irawati Dg. Tarring
 - Nurbiah
 - Sukmini Dg. Tongngi
 - Tamrin
 - Nurfadli

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 02 Juni 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN GOWA,


Andi Irawati Tahri, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19780926 199612 2 001

Lampiran 7. Studi Kelayakan Budidaya Ikan Lele BUMDes Harapan Jaya

STUDI KELAYAKAN

BUDIDAYA IKAN LELE



BUMDes "HARAPAN JAYA"

DESA BIRINGALA

KECAMATAN BAROMBONG

KABUPATEN GOWA

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Abd.Rahim Dg.Nuntung
- Umur : 67 thn
- Pekerjaan : Petani
- Alamat : Biringkanaya Desa Biringala Kec.Barombong Kab.gowa

Selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA (pemilik)

2. Nama : BUMDesa Harapan Jaya Desa Biringala
- Alamat : Desa Biringala Kec.Barombong Kab.Gowa

Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA (penyewa)

Berdasarkan pernyataan di atas, para pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Sewa lahan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

POKOK PERJANJIAN

1. Bahwa pihak PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah dengan luas 2 are, yang terletak di biringkanaya desa Biringala Kec.Barombong Kab.Gowa dan selanjutnya disebut TANAH.
2. Bahwa pihak PERTAMA akan menyewakan TANAH tersebut di atas kepada pihak KEDUA.
3. Bahwa TANAH tersebut disewa oleh BUMDesa Harapan Jaya selama 5 Tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian sewa lahan ini dengan biaya sewam sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah/tahun).
4. Bahwa pihak KEDUA berhak membangun dan memanfaatkan tanah sewa tersebut sesuai kepentingan BUMDesa Harapan Jaya
5. Bahwa pihak PERTAMA menyatakan benar-benar sebagai satu-satunya pemilik yang sah, tidak ada orang/pihak yang turut mempunyai hak atau mempunyai hak terlebih dahulu atas TANAH yang disewakan dengan perjanjian ini, sehingga pihak PERTAMA menjamin bahwa atas dibayarkannya uang sewa dan dilaksanakannya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA dapat menempati TANAH dan menggunakannya selama masa sewa menyewa tanah.
6. Bahwa pada akhir periode sewa akan diadakan pertemuan untuk membahas mengenai perpanjangan sewa dan/atau mengenai obyek bangunan yang dibangun pihak KEDUA
7. Bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari kedua pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

PASAL 2**PERALIHAN**

1. Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PERTAMA.
2. Apabila pihak KEDUA mengakhiri Masa Sewa sebelum berakhirnya Masa Sewa, uang sewa yang telah diterima oleh pihak PERTAMA tidak dapat dikembalikan.
3. Apabila pihak KEDUA melanggar ketentuan tersebut di atas termasuk, maka pihak PERTAMA, berhak secara sepihak membatalkan perjanjian ini dengan memperhitungkan uang yang sudah dibayarkan dan mengambil alih objek sewa.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin. NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Citra Ramadhani
NIM : 105611115718
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Juli 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursmah, S.Hum., M.I.P
* NBM. 964 591

Citra Ramadhani 105611115718

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jul-2022 10:22AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869911798

File name: BAB_1.docxXXX.docx (17.28K)

Word count: 966

Character count: 6561

Citra Ramadhani 105611115718 BAB I

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.stikes-aisyahbandung.ac.id Internet Source	1%
3	virayuniarch.wordpress.com Internet Source	1%

Exclude quotes

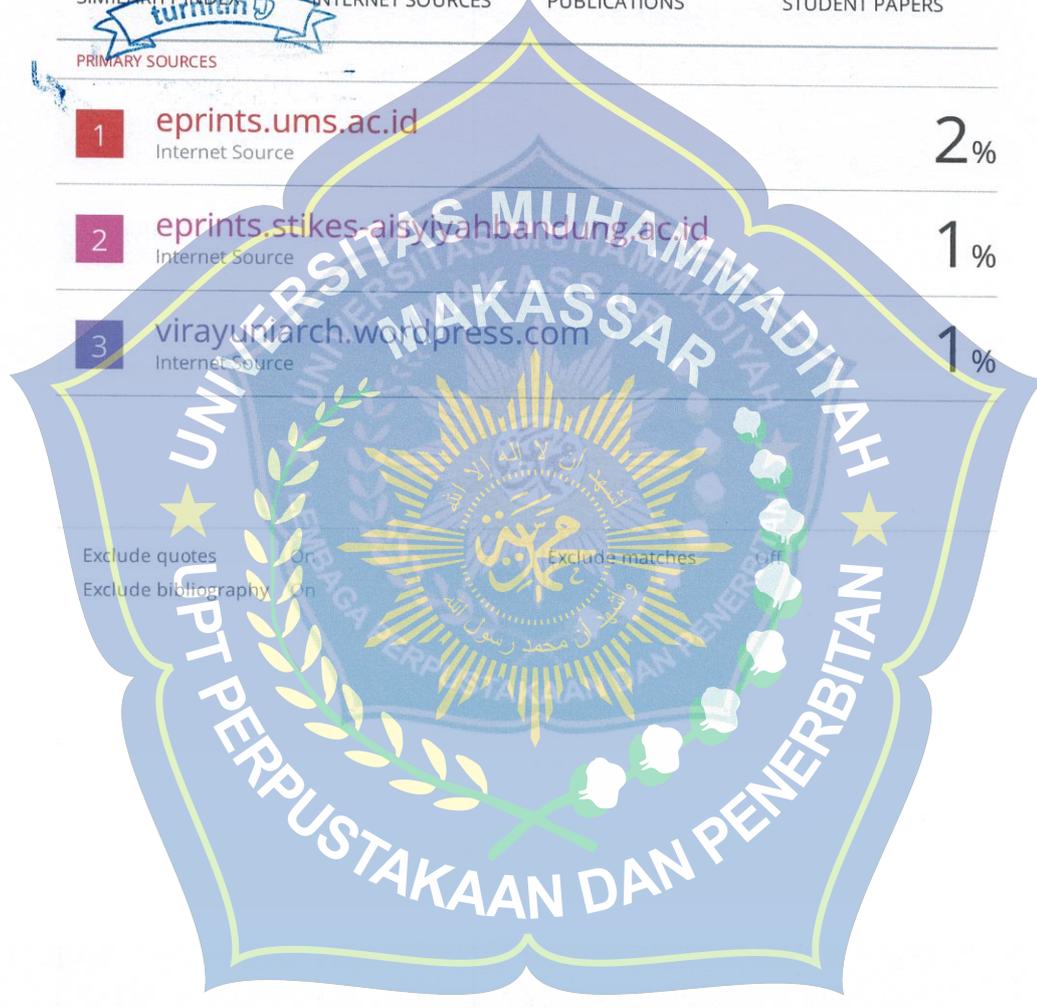
Or

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On



Citra Ramadhani 105611115718

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jul-2022 10:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869912040

File name: BAB_II.docxXX.docx (175.65K)

Word count: 5656

Character count: 38182

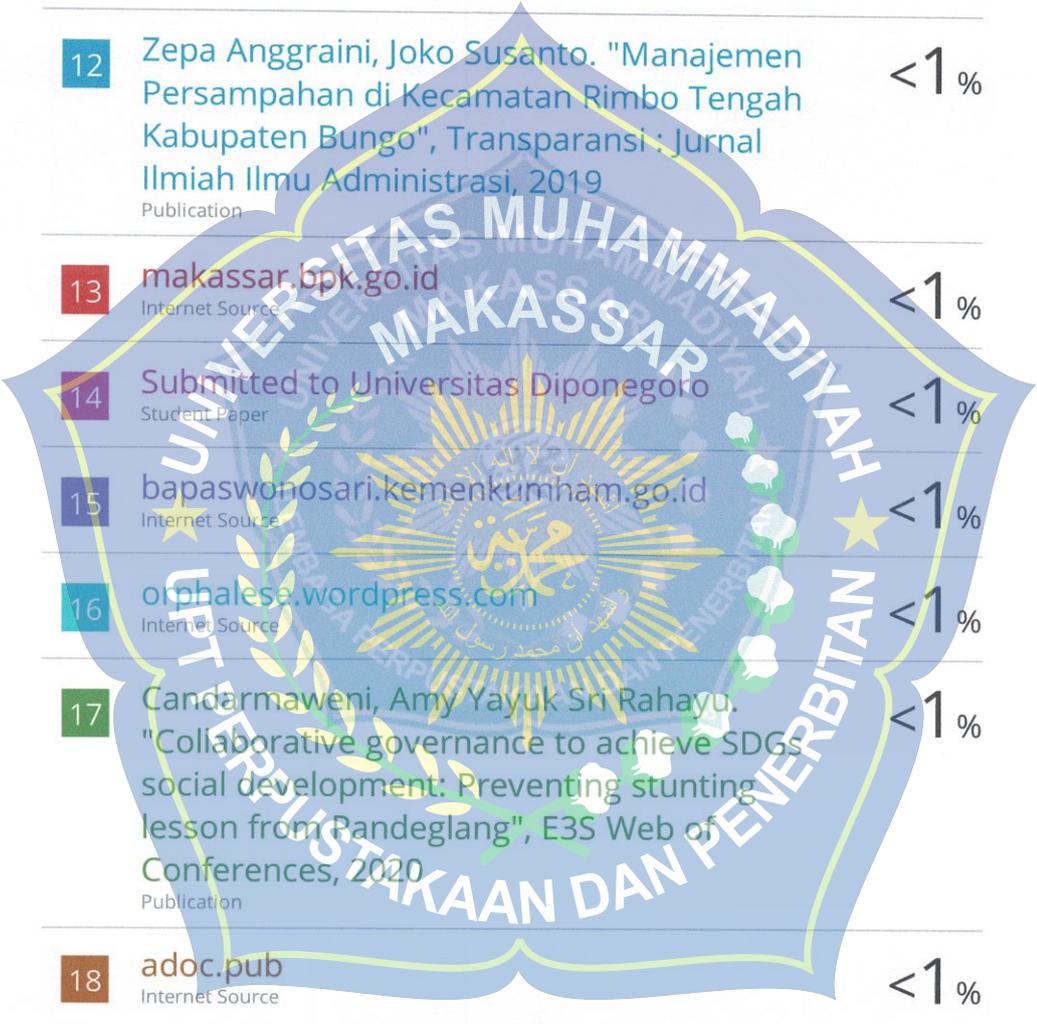
Citra Ramadhani 105611115718 BAB II

ORIGINALITY REPORT


10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.untirta.ac.id Internet Source	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
3	moam.info Internet Source	1%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
5	ateudida.wordpress.com Internet Source	<1%
6	pt.scribd.com Internet Source	<1%
7	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%
9	www.slideshare.net Internet Source	<1%



10	journal.kpu.go.id Internet Source	<1 %
11	noyanpost.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Zepa Anggraini, Joko Susanto. "Manajemen Persampahan di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo", <i>Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i> , 2019 Publication	<1 %
13	makassar.bpk.go.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
15	bapaswonosari.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
16	orphalese.wordpress.com Internet Source	<1 %
17	Candarmaweni, Amy Yayuk Sri Rahayu. "Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang", <i>E3S Web of Conferences</i> , 2020 Publication	<1 %
18	adoc.pub Internet Source	<1 %



19	albert1126.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	docplayer.info Internet Source	<1 %
21	id.scribd.com Internet Source	<1 %
22	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	eprints.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
25	media.neliti.com Internet Source	<1 %
26	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
27	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

 On

Exclude matches

 Off

Exclude bibliography

 On

Citra Ramadhani 105611115718

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jul-2022 10:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869912965

File name: BAB_III.docxX.docx (16.44K)

Word count: 703

Character count: 4754

Citra Ramadhani 105611115718 BAB III

ORIGINALITY REPORT



4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

3%

2

media.neliti.com

Internet Source

1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off



Citra Ramadhani 105611115718

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jul-2022 10:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869913325

File name: BAB_IV.docxxx.docx (135.73K)

Word count: 5998

Character count: 39730

7	docplayer.info Internet Source	<1 %
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
9	vdocuments.site Internet Source	<1 %
10	docobook.com Internet Source	<1 %
11	Nugroho Edie Santoso, Susilo Ambarwati. "IMPLEMENTASI PLANNING, ORGANIZING ACTUATING, DAN CONTROLLING PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM) SISWA PAPUA DAN PAPUA BARAT DI SMK NEGERI 2 JEMBER", Prosiding National Simposium & Conference Ahlimedia, 2020 Publication	<1 %
12	"Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes", Journal of Financial Crime, 2016 Publication	<1 %
13	syahriartato.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes OnExclude matches OffExclude bibliography On

Citra Ramadhani 105611115718 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
2	Elza Qorina Pangestika. "Peran Otoritas Jasa Keuangan pada Kredit Perbankan di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah", Jurnal Justiciabeten, 2020 Publication	1 %
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
4	Submitted to LL DIKTIX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<1 %
5	Zepa Anggraini, Joko Susanto. "Manajemen Persampahan di Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo". Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2019 Publication	<1 %
6	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %

Citra Ramadhani 105611115718

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 13-Jul-2022 10:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869913615

File name: BAB_V.docxx.docx (14.29K)

Word count: 198

Character count: 1360

Citra Ramadhani 105611115718 BAB V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Citra Ramadhani lahir di Bulukumba Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 9 Desember 2000, Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Harisman dan Sudarmi. Penulis menempuh pendidikan di SD 29 Bontomacinna

Kabupaten Bulukumba dan selesai pada tahun 2012, penulis melanjutkan Pendidikan SMP di MTSN 1 Bulukumba dan selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bulukumba dan selesai pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberi manfaat.

Dengan semangat yang tinggi dan motivasi dari orang-orang sekitar penulis terus berusaha dan belajar akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) dengan judul skripsi **“Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”**